

UMKM, KOPERASI, DAN EKONOMI RAKYAT

sebagai Fondasi Peningkatan Ekonomi Indonesia

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudyct.com/cv.pdf

Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI)

RudyCT Academic Series 2026



UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Rakyat

— sebagai —

Fondasi Peningkatan Ekonomi Indonesia

1



Produktivitas & Kenaikan Kelas

Meningkatkan daya saing, inovasi, dan kualitas menuju skala yang lebih tinggi.

2



Koperasi Modern

Koperasi yang sehat, profesional, dan berkelanjutan sebagai kekuatan ekonomi bersama.

3



Pembiayaan & Akses Pasar

Akses pembiayaan inklusif dan perluasan pasar lokal hingga global.

4



Digitalisasi UMKM

Pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi, pemasaran, dan pertumbuhan bisnis.

5



Pemerataan & Kesejahteraan

Pertumbuhan yang inklusif untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.



Oleh:

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

 www.rudyct.com/cv.pdf

 IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)



Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, serta beragam bentuk ekonomi rakyat merupakan bagian mendasar dari struktur ekonomi Indonesia. Peran strategisnya tidak hanya terletak pada jumlah unit usaha yang besar atau kemampuannya menyerap tenaga kerja, tetapi juga pada fungsi sosial-ekonomi yang lebih luas: menyebarkan kesempatan berusaha, mempertahankan pendapatan rumah tangga, menghidupkan ekonomi lokal, membangun jaringan produksi, memperluas kepemilikan aset, dan menyediakan mekanisme kolektif bagi masyarakat untuk meningkatkan daya tawar. Artikel ini membahas bagaimana UMKM, koperasi, dan ekonomi rakyat dapat menjadi fondasi peningkatan ekonomi Indonesia yang lebih produktif, inklusif, tangguh, digital, dan berkelanjutan. Data resmi menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025 dan 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I-2026. Pada September 2025, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25 persen dan Gini Ratio pengeluaran menjadi 0,363. Perkembangan tersebut memberi ruang bagi kebijakan ekonomi rakyat untuk bergerak dari pendekatan bertahan hidup menuju peningkatan produktivitas dan kenaikan kelas. Artikel menekankan pentingnya membedakan usaha mikro yang terutama berfungsi sebagai livelihood enterprise dari usaha kecil dan menengah yang memiliki potensi scale-up. Kebijakan satu ukuran untuk semua tidak memadai. Sebagian pelaku membutuhkan perlindungan dan simplifikasi, sebagian membutuhkan manajemen, teknologi, standar mutu, pembiayaan, dan pasar, sementara sebagian lain membutuhkan jalur ekspor, R&D, serta integrasi ke rantai nilai. Koperasi diposisikan bukan sebagai simbol ekonomi tradisional, melainkan sebagai institusi ekonomi modern untuk mengagregasi permintaan, produksi, pembiayaan, data, logistik, dan kepemilikan bersama. Dalam pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, energi, perumahan, dan ekonomi digital, koperasi dapat menurunkan biaya transaksi serta memperkuat bargaining ketika tata kelolanya profesional. Artikel juga mengkaji digitalisasi UMKM, akses pembiayaan, Kredit Usaha Rakyat, platform digital, AI, supply-chain integration, sertifikasi, logistik, kewirausahaan perempuan dan pemuda, ekonomi desa, industri mikro-kecil, ekonomi hijau, serta peran pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Kerangka yang diusulkan adalah 'Ekonomi Rakyat Naik Kelas' yang terdiri atas enam tahap: legalitas dan pencatatan, produktivitas, kualitas, akses pasar, integrasi rantai nilai, dan kepemilikan aset serta inovasi. Kesimpulan utama adalah bahwa UMKM dan koperasi tidak boleh diperlakukan hanya sebagai sektor yang perlu dibantu, tetapi sebagai basis produktif yang harus diperkuat kemampuannya. Indonesia akan memperoleh pertumbuhan yang lebih merata dan tahan guncangan bila jutaan unit ekonomi rakyat mampu meningkatkan produktivitas, membangun aset, menggunakan teknologi, bekerja sama melalui kelembagaan kolektif, dan terhubung dengan pasar modern tanpa kehilangan kemandirian.

Kata Kunci

UMKM; koperasi; ekonomi rakyat; produktivitas; kewirausahaan; pembiayaan; digitalisasi; rantai nilai; ekonomi lokal; Indonesia

Ringkasan Eksekutif

UMKM dan ekonomi rakyat merupakan struktur dasar perekonomian Indonesia karena aktivitasnya tersebar pada hampir seluruh wilayah dan berhubungan langsung dengan pendapatan rumah tangga. Namun peran besar secara jumlah tidak otomatis berarti produktivitas tinggi; agenda utama adalah membantu usaha yang berpotensi tumbuh agar naik kelas.

Koperasi memiliki nilai strategis ketika digunakan untuk mengatasi masalah skala. Petani, nelayan, pedagang, pekerja, atau konsumen yang terlalu kecil jika bertindak sendiri dapat mengagregasikan pembelian, produksi, pemasaran, data, dan pembiayaan melalui koperasi yang dikelola secara profesional.

Ekonomi rakyat tidak identik dengan ekonomi informal selamanya. Legalitas, pencatatan, perpajakan sederhana, jaminan sosial, standard, dan akses ke lembaga formal perlu tumbuh seiring peningkatan kemampuan. Formalisasi harus memberi manfaat, bukan sekadar menambah biaya.

Digitalisasi UMKM harus bergerak dari penggunaan media sosial dan marketplace menuju pembukuan, inventory, pembayaran, customer management, procurement, analytics, dan AI yang relevan. Teknologi produktif lebih penting daripada sekadar kehadiran digital.

Pembiayaan tetap penting, tetapi kredit tanpa kemampuan manajemen dapat memperbesar risiko. Pendekatan yang lebih kuat menggabungkan finance, mentoring, market access, dan data usaha. KUR dan program lain sebaiknya semakin berorientasi pada kenaikan produktivitas serta graduasi.

Supplier development adalah jalur penting untuk menghubungkan UMKM dengan hilirisasi dan investasi besar. Perusahaan besar, BUMN, pemerintah, dan kawasan industri dapat menyediakan standard, forecast, technical assistance, dan kontrak yang membuat usaha lokal berani berinvestasi.

Kebijakan UMKM perlu membedakan livelihood microenterprise dan growth-oriented enterprise. Usaha subsisten membutuhkan perlindungan serta simplifikasi, sedangkan usaha bertumbuh memerlukan scale finance, teknologi, sertifikasi, manajemen profesional, dan pasar.

Ekonomi rakyat yang kuat memperluas kelas menengah karena pendapatan usaha, aset produktif, dan kepemilikan kolektif tumbuh di masyarakat. Karena itu, strategi UMKM dan koperasi merupakan bagian dari agenda pemerataan aset, bukan hanya penciptaan pekerjaan.

Daftar Isi

1. Pendahuluan: Ekonomi Rakyat sebagai Struktur Dasar Ekonomi Indonesia
2. Kondisi Makro Indonesia dan Ruang bagi Ekonomi Rakyat
3. Memahami UMKM secara Heterogen
4. Ekonomi Rakyat: Konsep, Nilai, dan Batasannya
5. Koperasi sebagai Institusi Ekonomi Modern
6. Produktivitas sebagai Tantangan Utama UMKM
7. Dari Usaha Mikro menuju Usaha Kecil dan Menengah
8. Missing Middle dan Kenaikan Kelas
9. Manajemen, Pembukuan, dan Disiplin Operasi
10. Pembiayaan, KUR, dan Modal Pertumbuhan
11. Digitalisasi UMKM
12. AI dan Teknologi untuk Ekonomi Rakyat
13. Marketplace, Platform, dan Daya Tawar
14. Rantai Pasok dan Supplier Development
15. Koperasi Pertanian dan Agroindustri
16. Koperasi Perikanan dan Ekonomi Pesisir
17. Koperasi Konsumen, Pekerja, dan Jasa
18. UMKM Industri Mikro dan Kecil
19. UMKM Kreatif dan Pariwisata
20. UMKM Perempuan dan Inklusi Ekonomi
21. Pemuda, Startup, dan Kewirausahaan Baru
22. Ekonomi Desa dan Kota Kecil
23. Standard, Sertifikasi, dan Mutu
24. Ekspor UMKM dan Integrasi Global
25. Ekonomi Hijau, Circularity, dan UMKM
26. Peran Pemerintah Daerah
27. Peran Perguruan Tinggi dan IBM ASMI
28. Studi Kasus Analitis
29. Kerangka Ekonomi Rakyat Naik Kelas
30. Peta Jalan Indonesia 2026-2045

Glossarium

Daftar Pustaka

1. Pendahuluan: Ekonomi Rakyat sebagai Struktur Dasar Ekonomi Indonesia

Ekonomi rakyat hadir dekat rumah tangga. Dalam konteks 1. pendahuluan: ekonomi rakyat sebagai struktur dasar ekonomi indonesia, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Skalanya kecil tetapi tersebar. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Fungsi sosial dan ekonomi menyatu. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Produktivitas menentukan masa depan. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Kebijakan perlu melihat heterogenitas. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

2. Kondisi Makro Indonesia dan Ruang bagi Ekonomi Rakyat

Pertumbuhan nasional relatif kuat. Dalam konteks 2. kondisi makro indonesia dan ruang bagi ekonomi rakyat, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Kemiskinan menurun. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Ketimpangan pengeluaran membaik. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Konsentrasi wilayah tetap tinggi. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Ekonomi lokal perlu diperkuat. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

3. Memahami UMKM secara Heterogen

Usaha mikro sangat beragam. Dalam konteks 3. memahami umkm secara heterogen, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Sebagian livelihood, sebagian growth-oriented. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Sektor berbeda memerlukan kebijakan berbeda. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Tahap bisnis menentukan kebutuhan. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Segmentasi lebih baik daripada program seragam. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

Dimensi	Pertanyaan	Indikator
Legalitas	Apakah usaha tercatat dan terlindungi?	NIB, tax, contract
Produktivitas	Apakah output per pekerja naik?	Sales/worker
Manajemen	Apakah proses tertib?	Books, inventory
Pasar	Apakah pembeli bertambah?	Repeat buyer, exports
Digital	Apakah teknologi produktif?	ERP, payment, AI

Aset	Apakah kekayaan usaha bertambah?	Equipment, savings
------	----------------------------------	--------------------

4. Ekonomi Rakyat: Konsep, Nilai, dan Batasannya

Ekonomi rakyat menekankan partisipasi luas. Dalam konteks 4. ekonomi rakyat: konsep, nilai, dan batasannya, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Kepemilikan dan kontrol penting. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Skala kecil bukan tujuan permanen. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Efisiensi tetap diperlukan. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Solidaritas perlu bertemu profesionalisme. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

5. Koperasi sebagai Institusi Ekonomi Modern

Koperasi mengagregasi skala. Dalam konteks 5. koperasi sebagai institusi ekonomi modern, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Anggota adalah pemilik dan pengguna. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Governance menentukan keberhasilan. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat

diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Profesionalisme manajemen penting. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Digital cooperative membuka peluang baru. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

Dimensi	Pertanyaan	Indikator
Legalitas	Apakah usaha tercatat dan terlindungi?	NIB, tax, contract
Produktivitas	Apakah output per pekerja naik?	Sales/worker
Manajemen	Apakah proses tertib?	Books, inventory
Pasar	Apakah pembeli bertambah?	Repeat buyer, exports
Digital	Apakah teknologi produktif?	ERP, payment, AI
Aset	Apakah kekayaan usaha bertambah?	Equipment, savings

6. Produktivitas sebagai Tantangan Utama UMKM

Produktivitas rendah membatasi upah. Dalam konteks 6. produktivitas sebagai tantangan utama umkm, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Management practice penting. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Teknologi meningkatkan output. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Skala dan pasar menentukan. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Data membantu keputusan. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

Dimensi	Pertanyaan	Indikator
Legalitas	Apakah usaha tercatat dan terlindungi?	NIB, tax, contract
Produktivitas	Apakah output per pekerja naik?	Sales/worker
Manajemen	Apakah proses tertib?	Books, inventory
Pasar	Apakah pembeli bertambah?	Repeat buyer, exports
Digital	Apakah teknologi produktif?	ERP, payment, AI
Aset	Apakah kekayaan usaha bertambah?	Equipment, savings

7. Dari Usaha Mikro menuju Usaha Kecil dan Menengah

Graduasi adalah proses. Dalam konteks 7. dari usaha mikro menuju usaha kecil dan menengah, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Formalitas tumbuh bertahap. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Finance mengikuti capability. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Skill dan sistem perlu naik. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Market discipline penting. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku

dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

8. Missing Middle dan Kenaikan Kelas

Perusahaan menengah relatif sedikit. Dalam konteks 8. missing middle dan kenaikan kelas, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Mereka penting sebagai supplier. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Kredit dan manajemen menjadi bottleneck. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Regulasi dapat menciptakan threshold. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Scale-up perlu ekosistem. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

9. Manajemen, Pembukuan, dan Disiplin Operasi

Pembukuan memberi visibility. Dalam konteks 9. manajemen, pembukuan, dan disiplin operasi, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Inventory mengunci modal. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Cash flow menentukan survival. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Quality memerlukan standard process. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Manajemen adalah teknologi. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

10. Pembiayaan, KUR, dan Modal Pertumbuhan

Kredit membuka investasi. Dalam konteks 10. pembiayaan, kur, dan modal pertumbuhan, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Collateral membatasi akses. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Cash-flow lending penting. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

KUR perlu graduasi. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Equity dan guarantee melengkapi. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

Dimensi	Pertanyaan	Indikator
Legalitas	Apakah usaha tercatat dan terlindungi?	NIB, tax, contract
Produktivitas	Apakah output per pekerja naik?	Sales/worker
Manajemen	Apakah proses tertib?	Books, inventory

Pasar	Apakah pembeli bertambah?	Repeat buyer, exports
Digital	Apakah teknologi produktif?	ERP, payment, AI
Aset	Apakah kekayaan usaha bertambah?	Equipment, savings

11. Digitalisasi UMKM

Digital payment memberi jejak transaksi. Dalam konteks 11. digitalisasi umkm, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Marketplace membuka pasar. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

ERP ringan memperbaiki operasi. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Cloud menurunkan fixed cost. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Digital maturity perlu bertahap. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

Dimensi	Pertanyaan	Indikator
Legalitas	Apakah usaha tercatat dan terlindungi?	NIB, tax, contract
Produktivitas	Apakah output per pekerja naik?	Sales/worker
Manajemen	Apakah proses tertib?	Books, inventory
Pasar	Apakah pembeli bertambah?	Repeat buyer, exports
Digital	Apakah teknologi produktif?	ERP, payment, AI
Aset	Apakah kekayaan usaha bertambah?	Equipment, savings

12. AI dan Teknologi untuk Ekonomi Rakyat

AI dapat membantu pemasaran. Dalam konteks 12. ai dan teknologi untuk ekonomi rakyat, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Forecasting membantu inventory. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Generative tools menurunkan biaya konten. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Risiko error tetap. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Model sederhana sering cukup. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

13. Marketplace, Platform, dan Daya Tawar

Platform menurunkan search cost. Dalam konteks 13. marketplace, platform, dan daya tawar, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Network effect meningkatkan konsentrasi. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Fee memengaruhi margin. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Data merchant bernilai. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Portability membantu bargaining. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

14. Rantai Pasok dan Supplier Development

Kontrak memberi demand. Dalam konteks 14. rantai pasok dan supplier development, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Standard membuka upgrading. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Forecast membantu investasi. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Prompt payment penting. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Perusahaan besar dapat menjadi mentor. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

Dimensi	Pertanyaan	Indikator
Legalitas	Apakah usaha tercatat dan terlindungi?	NIB, tax, contract
Produktivitas	Apakah output per pekerja naik?	Sales/worker
Manajemen	Apakah proses tertib?	Books, inventory

Pasar	Apakah pembeli bertambah?	Repeat buyer, exports
Digital	Apakah teknologi produktif?	ERP, payment, AI
Aset	Apakah kekayaan usaha bertambah?	Equipment, savings

15. Koperasi Pertanian dan Agroindustri

Petani menghadapi skala kecil. Dalam konteks 15. koperasi pertanian dan agroindustri, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Input dapat dibeli bersama. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Processing meningkatkan nilai. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Data dan logistics penting. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Governance menghindari elite capture. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

16. Koperasi Perikanan dan Ekonomi Pesisir

Nelayan menghadapi posisi tawar lemah. Dalam konteks 16. koperasi perikanan dan ekonomi pesisir, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Ice dan cold chain penting. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Auction kolektif memperbaiki harga. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Resource sustainability wajib. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Traceability membuka ekspor. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

17. Koperasi Konsumen, Pekerja, dan Jasa

Koperasi tidak hanya produksi. Dalam konteks 17. koperasi konsumen, pekerja, dan jasa, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Konsumen dapat mengagregasi demand. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Worker cooperative berbagi ownership. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Service cooperative membantu freelancer. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Model perlu business discipline. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

18. UMKM Industri Mikro dan Kecil

IMK menyerap tenaga kerja. Dalam konteks 18. umkm industri mikro dan kecil, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Teknologi beragam. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Quality gap besar. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Shared facility membantu. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Cluster menurunkan fixed cost. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

19. UMKM Kreatif dan Pariwisata

Nilai berasal dari ide. Dalam konteks 19. umkm kreatif dan pariwisata, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Brand dan desain penting. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Digital distribution memperluas pasar. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

IP perlu dilindungi. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Destination linkage menciptakan multiplier. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

20. UMKM Perempuan dan Inklusi Ekonomi

Perempuan banyak pada mikro usaha. Dalam konteks 20. umkm perempuan dan inklusi ekonomi, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Care burden membatasi waktu. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Asset ownership memengaruhi kredit. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Digital memberi fleksibilitas. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Program perlu sensitif konteks. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

21. Pemuda, Startup, dan Kewirausahaan Baru

Pemuda memiliki adaptasi digital. Dalam konteks 21. pemuda, startup, dan kewirausahaan baru, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Network dan modal terbatas. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Mentoring penting. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Startup bukan satu-satunya jalur. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Entrepreneurship perlu market. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

22. Ekonomi Desa dan Kota Kecil

Desa membutuhkan diversifikasi. Dalam konteks 22. ekonomi desa dan kota kecil, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Kota kecil menjadi hub. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Logistics menghubungkan produksi. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Broadband membuka jasa. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Koperasi dapat menjadi anchor. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

23. Standard, Sertifikasi, dan Mutu

Standard membuka pasar. Dalam konteks 23. standard, sertifikasi, dan mutu, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Compliance memiliki biaya. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Shared lab membantu. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Traceability semakin penting. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Quality culture lebih penting dari sertifikat. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

24. Ekspor UMKM dan Integrasi Global

Ekspor memperluas scale. Dalam konteks 24. ekspor umkm dan integrasi global, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Compliance menjadi barrier. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Aggregator dapat membantu. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

E-commerce lintas negara berkembang. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Trade finance penting. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

25. Ekonomi Hijau, Circularity, dan UMKM

UMKM dekat dengan material flow. Dalam konteks 25. ekonomi hijau, circularity, dan umkm, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Efficiency menurunkan biaya. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Repair adalah ekonomi sirkular. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Waste dapat menjadi input. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Green standard membuka pasar. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

26. Peran Pemerintah Daerah

Daerah memahami konteks. Dalam konteks 26. peran pemerintah daerah, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Perizinan harus sederhana. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Business service perlu dekat. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Procurement membuka pasar. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Data lokal penting. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

27. Peran Perguruan Tinggi dan IBM ASMI

Kampus membangun skill. Dalam konteks 27. peran perguruan tinggi dan ibm asmi, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Applied research membantu UMKM. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Student project memberi solusi. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Incubator perlu market focus. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Data analytics dapat membantu kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

28. Studi Kasus Analitis

Kasus memberi pembelajaran nyata. Dalam konteks 28. studi kasus analitis, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Tidak semua usaha sama. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Koperasi memerlukan governance. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Digitalisasi perlu tujuan. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Outcome menentukan sukses. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

29. Kerangka Ekonomi Rakyat Naik Kelas

Tahap pertama legalitas. Dalam konteks 29. kerangka ekonomi rakyat naik kelas, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Tahap kedua produktivitas. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Tahap ketiga kualitas. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Tahap keempat pasar. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Tahap lanjut asset dan innovation. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

Dimensi	Pertanyaan	Indikator
Legalitas	Apakah usaha tercatat dan terlindungi?	NIB, tax, contract
Produktivitas	Apakah output per pekerja naik?	Sales/worker
Manajemen	Apakah proses tertib?	Books, inventory
Pasar	Apakah pembeli bertambah?	Repeat buyer, exports
Digital	Apakah teknologi produktif?	ERP, payment, AI
Aset	Apakah kekayaan usaha bertambah?	Equipment, savings

30. Peta Jalan Indonesia 2026-2045

Fondasi dibangun sekarang. Dalam konteks 30. peta jalan indonesia 2026-2045, kebijakan perlu berangkat dari realitas bahwa unit usaha rakyat bukan kelompok homogen. Pelaku berbeda dalam tujuan, kemampuan, sektor, lokasi, akses modal, penggunaan teknologi, serta ambisi tumbuh. Kesalahan umum adalah menganggap semua UMKM membutuhkan program yang sama.

Digital dan finance diperluas. Produktivitas menjadi pembeda utama antara usaha yang sekadar mempertahankan penghidupan dan usaha yang mampu membayar upah, membangun aset, serta berinvestasi. Peningkatan produktivitas dapat datang dari manajemen yang lebih baik, alat yang lebih tepat, kualitas, digitalisasi, logistics, dan market.

Koperasi profesional diperkuat. Koperasi menawarkan mekanisme mengatasi keterbatasan skala. Melalui pembelian bersama, produksi bersama, pemasaran, data, dan pembiayaan, biaya transaksi dapat diturunkan. Namun keunggulan tersebut hanya muncul jika governance, akuntansi, audit, dan profesionalisme manajemen kuat.

Supplier serta ekspor ditingkatkan. Digitalisasi mempercepat transaksi dan transparansi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Marketplace dapat menambah pesanan sementara cash flow dan quality tetap buruk. Karena itu, teknologi perlu dihubungkan dengan proses operasi dan kemampuan organisasi.

Ekonomi rakyat menjadi kelas menengah produktif. Kebijakan publik sebaiknya mengukur kenaikan kelas melalui perubahan nyata: omzet per pekerja, margin, formalitas, jumlah tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sertifikasi, akses pasar, ekspor, aset, atau kemampuan memperoleh pembiayaan tanpa subsidi.

Prinsip yang digunakan artikel ini adalah empowerment through capability. Ekonomi rakyat diperkuat bukan dengan mempertahankan skala kecil sebagai identitas permanen, tetapi dengan memberi peluang agar pelaku

dapat memilih: tetap kecil tetapi produktif, tumbuh menjadi perusahaan menengah, atau bergabung melalui koperasi dan jaringan untuk memperoleh skala kolektif.

Studi Kasus Analitis

Kasus 1: Koperasi Susu

Peternak kecil menggabungkan collection, cooling, quality testing, dan penjualan melalui koperasi. Nilai koperasi muncul ketika mutu susu meningkat, pembayaran transparan, input diperoleh lebih murah, serta anggota memiliki data produksi.

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa keberhasilan tidak berasal dari label UMKM atau koperasi itu sendiri, melainkan dari kombinasi capability, governance, scale, market discipline, dan pembagian manfaat yang dipercaya.

Kasus 2: Koperasi Kopi Specialty

Petani membangun proses fermentasi, grading, roasting, traceability, dan branding bersama. Premium hanya bertahan bila quality consistency terjaga serta pembagian nilai transparan.

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa keberhasilan tidak berasal dari label UMKM atau koperasi itu sendiri, melainkan dari kombinasi capability, governance, scale, market discipline, dan pembagian manfaat yang dipercaya.

Kasus 3: Koperasi Nelayan

Koperasi menyediakan ice, fuel, cold storage, auction, dan akses pembiayaan. Posisi tawar nelayan meningkat, tetapi governance stock ikan dan repayment perlu disiplin.

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa keberhasilan tidak berasal dari label UMKM atau koperasi itu sendiri, melainkan dari kombinasi capability, governance, scale, market discipline, dan pembagian manfaat yang dipercaya.

Kasus 4: UMKM Makanan Naik Kelas

Usaha makanan memulai pencatatan digital, standard recipe, packaging, izin, dan quality control sebelum masuk retail modern. Omzet tumbuh karena reliability, bukan marketing saja.

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa keberhasilan tidak berasal dari label UMKM atau koperasi itu sendiri, melainkan dari kombinasi capability, governance, scale, market discipline, dan pembagian manfaat yang dipercaya.

Kasus 5: Supplier Otomotif

Perusahaan kecil memperoleh kontrak komponen setelah mengikuti supplier development. Quality, delivery, cost, dan documentation menjadi kunci. Kontrak jangka menengah memberi keberanian investasi mesin.

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa keberhasilan tidak berasal dari label UMKM atau koperasi itu sendiri, melainkan dari kombinasi capability, governance, scale, market discipline, dan pembagian manfaat yang dipercaya.

Kasus 6: Marketplace Merchant

Pedagang online mengalami penjualan tinggi namun margin turun karena iklan, komisi, dan retur. Analisis unit economics membuat bisnis mengubah mix produk serta membangun kanal pelanggan sendiri.

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa keberhasilan tidak berasal dari label UMKM atau koperasi itu sendiri, melainkan dari kombinasi capability, governance, scale, market discipline, dan pembagian manfaat yang dipercaya.

Kasus 7: Koperasi Pekerja Digital

Freelancer bergabung untuk berbagi marketing, billing, software, dan benefit. Koperasi memberi skala kolektif tanpa harus menjadi karyawan satu perusahaan.

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa keberhasilan tidak berasal dari label UMKM atau koperasi itu sendiri, melainkan dari kombinasi capability, governance, scale, market discipline, dan pembagian manfaat yang dipercaya.

Kasus 8: UMKM Perempuan dan Childcare

Pengusaha perempuan mampu meningkatkan jam produktif ketika terdapat layanan childcare. Program pembiayaan menjadi lebih efektif karena constraint waktu juga diselesaikan.

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa keberhasilan tidak berasal dari label UMKM atau koperasi itu sendiri, melainkan dari kombinasi capability, governance, scale, market discipline, dan pembagian manfaat yang dipercaya.

Kasus 9: Desa Wisata

Koperasi desa mengelola booking, homestay, guide, craft, dan conservation fee. Governance diperlukan agar manfaat tidak terkonsentrasi pada beberapa keluarga.

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa keberhasilan tidak berasal dari label UMKM atau koperasi itu sendiri, melainkan dari kombinasi capability, governance, scale, market discipline, dan pembagian manfaat yang dipercaya.

Kasus 10: Koperasi Energi

Komunitas mengelola solar microgrid atau energi bersama. Model membutuhkan tarif, maintenance, reserve fund, dan teknisi yang profesional.

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa keberhasilan tidak berasal dari label UMKM atau koperasi itu sendiri, melainkan dari kombinasi capability, governance, scale, market discipline, dan pembagian manfaat yang dipercaya.

Kasus 11: Shared Production Facility

Beberapa UMKM menggunakan dapur atau workshop bersama untuk mencapai standard. Utilization, booking, maintenance, dan liability menentukan sustainability fasilitas.

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa keberhasilan tidak berasal dari label UMKM atau koperasi itu sendiri, melainkan dari kombinasi capability, governance, scale, market discipline, dan pembagian manfaat yang dipercaya.

Kasus 12: Digital Bookkeeping dan Kredit

Usaha yang memiliki data transaksi konsisten lebih mudah dinilai bank. Namun data perlu dimiliki dan dapat dipindahkan agar usaha tidak terkunci pada platform.

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa keberhasilan tidak berasal dari label UMKM atau koperasi itu sendiri, melainkan dari kombinasi capability, governance, scale, market discipline, dan pembagian manfaat yang dipercaya.

Kasus 13: UMKM Circular Repair

Bisnis reparasi memperpanjang umur produk sekaligus menciptakan pekerjaan lokal. Right-to-repair dan akses spare part dapat memperkuat sektor ini.

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa keberhasilan tidak berasal dari label UMKM atau koperasi itu sendiri, melainkan dari kombinasi capability, governance, scale, market discipline, dan pembagian manfaat yang dipercaya.

Kasus 14: Ekspor Furniture

Usaha furniture berkembang melalui desain, quality, kiln drying, certification, dan buyer relationship. Nilai tambah terbesar berasal dari capability, bukan hanya bahan kayu.

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa keberhasilan tidak berasal dari label UMKM atau koperasi itu sendiri, melainkan dari kombinasi capability, governance, scale, market discipline, dan pembagian manfaat yang dipercaya.

Kasus 15: Koperasi Pangan Sekolah

Kelompok produsen lokal memasok program makan melalui standard serta kontrak yang jelas. Skala demand dapat mendorong formalitas, tetapi food safety dan pembayaran harus dijaga.

Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa keberhasilan tidak berasal dari label UMKM atau koperasi itu sendiri, melainkan dari kombinasi capability, governance, scale, market discipline, dan pembagian manfaat yang dipercaya.

Pendalaman Konseptual dan Kebijakan

A. Entrepreneurship sebagai Proses, bukan Identitas

Kewirausahaan sering dipromosikan sebagai identitas yang harus dimiliki semua orang, padahal tidak semua individu perlu menjadi entrepreneur. Sebagian masyarakat lebih produktif sebagai pekerja profesional. Kebijakan perlu memberi pilihan, bukan mendorong entrepreneurship karena pasar kerja lemah.

Usaha baru menghadapi liability of newness: belum memiliki pelanggan, reputasi, proses, atau cash flow. Mentoring dan market access penting pada tahap awal.

Entrepreneurship berkualitas menciptakan nilai melalui produk, layanan, inovasi, atau efisiensi, bukan hanya arbitrase atau duplikasi usaha jenuh.

Failure perlu memiliki second chance. Bankruptcy dan credit reporting harus membedakan kegagalan bisnis jujur dari fraud.

Ekosistem yang sehat memiliki entry dan exit; mempertahankan semua usaha tanpa melihat produktivitas dapat mengunci sumber daya.

B. Koperasi dan Teori Biaya Transaksi

Koperasi dapat dipahami sebagai jawaban terhadap biaya transaksi dan market power. Ketika petani terlalu kecil menghadapi pembeli besar, collective selling mengubah bargaining. Ketika input mahal, collective procurement mengurangi harga.

Namun koperasi sendiri memiliki biaya governance: rapat, monitoring, free-riding, conflict, dan agency antara anggota serta manajer. Struktur perlu didesain sesuai fungsi.

Koperasi yang terlalu banyak tujuan sering kehilangan fokus. Koperasi yang jelas pada satu economic problem lebih mudah diukur.

Digital ledger, member portal, dan audit dapat menurunkan biaya informasi, tetapi tidak mengganti trust serta rule.

Skala ekonomi kolektif menjadi alasan utama modernisasi koperasi.

C. Cooperative Governance

Prinsip satu anggota satu suara menjaga demokrasi, tetapi keputusan bisnis tetap memerlukan kecepatan serta expertise. Pemisahan peran board dan professional management menjadi penting.

Audit, disclosure, conflict-of-interest rule, dan member education mencegah elite capture. Koperasi gagal bila pengurus menggunakan aset anggota untuk kepentingan sendiri.

Patronage refund atau pembagian hasil perlu mencerminkan transaksi anggota dan kesehatan modal koperasi. Seluruh surplus tidak boleh dibagi bila investasi dibutuhkan.

Capitalization menjadi tantangan karena cooperative equity lebih sulit dihimpun. Retained earnings, member shares, cooperative bank, dan external debt perlu diseimbangkan.

Governance yang baik membuat koperasi dapat bersaing dengan perusahaan investor-owned tanpa kehilangan prinsip anggota.

D. Produktivitas dan Management Practice

Studi lintas negara menunjukkan management practice menjelaskan sebagian perbedaan produktivitas perusahaan. Target, monitoring, incentive, inventory, quality, dan people management adalah teknologi organisasi.

UMKM sering berfokus pada penjualan sehingga pencatatan dan process discipline tertinggal. Ketika usaha tumbuh, ketergantungan pada ingatan pemilik menjadi bottleneck.

Standard operating procedure tidak harus birokratis. Dokumen sederhana untuk pembelian, produksi, quality, dan cash dapat mengurangi error.

Digital tools membantu bila proses sudah jelas. Software yang kompleks pada organisasi tidak tertib justru menambah kebingungan.

Management extension service dapat memberi productivity gain besar dengan biaya lebih rendah daripada subsidi mesin yang tidak terpakai.

E. Pembiayaan Berbasis Arus Kas

Banyak UMKM tidak memiliki collateral formal tetapi memiliki cash flow. Digital transactions dan accounting dapat membantu bank menilai repayment capacity.

Cash-flow lending tetap membutuhkan governance agar data tidak dimanipulasi dan borrower memahami kewajiban. Model algorithmic perlu fairness serta review.

Kredit jangka pendek cocok working capital, sedangkan machinery membutuhkan tenor lebih panjang. Mismatch maturity dapat menghancurkan cash flow.

Guarantee pemerintah dapat mengurangi risk, tetapi harus menjaga incentive bank melakukan appraisal.

Finance yang baik mengikuti kebutuhan bisnis, bukan target penyaluran semata.

F. Kredit Usaha Rakyat dan Graduasi

Program kredit bersubsidi dapat memperluas akses dan menurunkan biaya, tetapi tujuan jangka panjang sebaiknya graduasi menuju pembiayaan komersial.

Graduasi perlu diukur dari peningkatan cash flow, credit history, formalitas, dan kemampuan membayar market rate. Jika usaha terus bergantung subsidi, additionality perlu ditinjau.

Database kredit serta interoperabilitas dapat membantu mencegah over-borrowing.

Business development service yang terhubung dengan lender membantu penggunaan dana produktif.

KUR dapat menjadi jembatan, bukan tujuan akhir ekosistem pembiayaan.

G. Digital Platform Economics

Platform mempertemukan banyak penjual dan pembeli sehingga network effects menurunkan search cost. Namun pasar dapat terkonsentrasi karena pengguna cenderung memilih platform dengan jaringan terbesar.

Merchant memperoleh access, payment, logistics, dan advertising tetapi juga tergantung pada ranking, fee, dan rule platform. Perubahan algoritma dapat memengaruhi pendapatan.

Data portability serta multi-homing mengurangi switching cost. Competition policy perlu memastikan platform tidak menutup akses secara tidak wajar.

UMKM sebaiknya menggunakan platform sebagai channel, bukan menyerahkan seluruh customer relationship. Brand serta first-party data tetap bernilai.

Government program digitalization perlu mengukur margin dan productivity, bukan GMV semata.

H. AI untuk UMKM

Generative AI dapat membantu menulis deskripsi produk, menerjemahkan, membuat draft proposal, customer response, dan ide desain. Manfaat terbesar datang dari penghematan waktu pada tugas administratif.

Forecasting sederhana dapat membantu stock dan cash flow, tetapi data historis perlu berkualitas. Model besar tidak selalu dibutuhkan.

AI juga berisiko menghasilkan kesalahan, pelanggaran IP, atau leakage data. UMKM memerlukan guidance praktis, bukan hanya promosi.

Shared AI service melalui koperasi atau asosiasi dapat menurunkan biaya dan memberi domain knowledge.

AI harus meningkatkan kemampuan pemilik membuat keputusan, bukan menggantikan tanggung jawab.

I. Supplier Development

Perusahaan besar dapat menjadi sekolah bagi supplier melalui standard, audit, technical assistance, dan forecast demand. Supplier belajar quality, delivery, cost, dan documentation.

Kontrak yang terlalu pendek membuat supplier enggan investasi. Relationship yang stabil tetapi tetap kompetitif lebih baik.

Prompt payment sangat penting. Perusahaan besar yang membayar lambat memindahkan kebutuhan financing ke supplier kecil.

Supplier development perlu memilih perusahaan dengan potential; tidak semua usaha harus masuk industri besar.

Keberhasilan diukur dari supplier yang memperoleh customer tambahan atau ekspor, bukan hanya ketergantungan pada anchor.

J. Export Readiness

Ekspor membutuhkan consistency, standard, volume, documentation, logistics, finance, dan customer service. Produk bagus saja tidak cukup.

Aggregator dapat membantu UMKM menggabungkan volume, tetapi transparency harga dan fee diperlukan.

Cross-border e-commerce membuka niche market, namun return, customs, tax, dan fulfillment menjadi kompleks.

Trade fair efektif bila diikuti buyer qualification dan follow-up, bukan sekadar partisipasi.

Export readiness assessment membantu usaha fokus pada gap sebelum menghabiskan biaya promosi.

K. Perempuan dan Entrepreneurship

Usaha perempuan sering beroperasi pada sektor dengan entry barrier rendah serta margin kecil. Ini tidak mencerminkan kurangnya kemampuan, tetapi constraint aset, waktu, network, dan market.

Childcare, property rights, digital literacy, serta mentorship dapat sama pentingnya dengan kredit.

Program perempuan perlu menghindari stereotip hanya pada craft atau makanan. Technology, manufacturing, dan professional service juga relevan.

Safety dan mobility memengaruhi kemampuan menghadiri pasar atau training.

Gender-responsive policy memperluas entrepreneurship pool dan household income.

L. Youth Entrepreneurship

Pemuda memiliki keunggulan learning speed tetapi kekurangan pengalaman dan network. Incubator perlu menyediakan mentor, customer discovery, dan prototype, bukan ruang kerja saja.

Entrepreneurship education sebaiknya berbasis project dan market test. Business plan tanpa customer memiliki nilai terbatas.

Digital entrepreneurship dapat dimulai dengan modal rendah tetapi competition global tinggi.

Apprenticeship di perusahaan sebelum berusaha dapat membangun tacit knowledge.

Failure early dapat menjadi pembelajaran bila tidak menghasilkan utang destruktif.

M. Green UMKM

Efisiensi energi, air, material, dan waste sering langsung menurunkan biaya. Green transition UMKM dapat dimulai dari resource productivity sebelum sertifikasi kompleks.

Solar, efficient equipment, packaging reduction, repair, reuse, dan recycling menawarkan peluang usaha.

Green finance perlu sederhana dan berbasis saving. Audit energi dapat membantu menghitung payback.

Standard lingkungan ekspor akan semakin penting bagi supplier. Data sederhana perlu dimulai sejak awal.

UMKM hijau dapat menjadi bagian circular local economy.

N. Social Enterprise dan Ekonomi Rakyat

Social enterprise menggabungkan tujuan bisnis dan sosial, misalnya employment kelompok rentan, waste recycling, atau layanan desa. Sustainability tetap membutuhkan revenue model.

Koperasi dan social enterprise memiliki overlap tetapi governance berbeda. Pilihan bentuk hukum perlu sesuai kepemilikan serta tujuan.

Impact measurement perlu proporsional. Organisasi kecil tidak perlu laporan kompleks tetapi harus mampu menunjukkan outcome.

Blended finance dapat cocok karena sebagian manfaat tidak memiliki cash flow langsung.

Social enterprise bukan alasan mengabaikan unit economics; misi kuat memerlukan organisasi yang bertahan.

O. Informalitas dan Formalisasi Bertahap

Informalitas muncul karena ukuran kecil, biaya compliance, kurangnya benefit, serta sifat pekerjaan. Menuntut formalitas penuh seketika dapat mendorong exit.

Progressive formalization memberi tahapan: identitas usaha, rekening, pencatatan, tax sederhana, social security, standard, lalu compliance lebih kompleks saat scale meningkat.

Threshold regulation perlu halus agar usaha tidak sengaja menahan pertumbuhan untuk menghindari kewajiban.

Formalitas harus membuka access: contract enforcement, finance, procurement, export, dan protection.

Keberhasilan adalah ketika menjadi formal terasa sebagai upgrade, bukan hukuman.

Kerangka Ekonomi Rakyat Naik Kelas

Tahap	Fokus	Instrumen	Hasil
1. Legal & Record	Identitas dan pencatatan	NIB, account, bookkeeping	Visibility
2. Productivity	Operasi dan manajemen	SOP, tools, training	Output/worker
3. Quality	Mutu dan standard	Certification, lab	Market trust
4. Market	Akses pelanggan	Marketplace, procurement	Sales growth
5. Value Chain	Supplier dan ekspor	Contract, logistics	Scale
6. Asset & Innovation	Kekayaan dan produk baru	Finance, R&D, IP	Resilience

Lima Skenario Indonesia 2045

Skenario 1: Banyak Usaha, Produktivitas Rendah

Jumlah UMKM tetap besar tetapi mayoritas subsisten. Program tersebar tipis, kredit meningkat, namun management, quality, dan market tidak membaik.

Skenario 2: Digital tetapi Bergantung Platform

UMKM masuk marketplace dan pembayaran digital, tetapi margin rendah, data terkunci, dan produktivitas produksi tidak berubah.

Skenario 3: Koperasi Banyak tetapi Lemah

Jumlah koperasi tinggi tetapi governance, capital, dan member participation lemah. Koperasi menjadi administratif, bukan economic engine.

Skenario 4: Pertumbuhan Enclave

Investasi besar tumbuh tetapi supplier lokal dan ekonomi rakyat tidak terhubung. Ketimpangan antarperusahaan melebar.

Skenario 5: Ekonomi Rakyat Produktif

UMKM tersegmentasi, koperasi profesional, perusahaan menengah tumbuh, supplier lokal masuk value chain, digitalisasi produktif, dan aset masyarakat meningkat.

Balanced Scorecard Ekonomi Rakyat

Perspektif	Tujuan	Indikator	Risiko
Produktivitas	Output naik	Sales/worker	Subsistence trap
Pasar	Customer bertambah	Repeat/export	Platform dependence
Finance	Modal sehat	DSCR, credit history	Over-debt
Digital	Teknologi produktif	ERP, payment, AI	Digital theater
Koperasi	Skala kolektif	Member trade	Elite capture
Pekerjaan	Job quality naik	Wage, formal	Precarity
Aset	Kekayaan tumbuh	Equipment, savings	Consumption debt
Wilayah	Multiplier lokal	Local sourcing	Enclave

Peta Jalan 2026-2045

Tahap 1: Segmentasi dan Data (2026-2028)

Bedakan livelihood microenterprise, growth-oriented SME, cooperative enterprise, dan startup. Bangun data yang memungkinkan program sesuai tahap.

Tahap 2: Universal Business Basics (2026-2030)

Perluas pencatatan, digital payment, legal identity, simple tax, consumer protection, dan business literacy.

Tahap 3: Productivity Extension (2027-2032)

Bangun jaringan extension untuk management, quality, machinery, digital, energy, dan cybersecurity.

Tahap 4: Cooperative Modernization (2027-2033)

Perkuat audit, management, digital member system, capitalization, dan sektor koperasi berbasis kebutuhan ekonomi nyata.

Tahap 5: Supplier and Market Upgrading (2028-2036)

Integrasikan UMKM ke hilirisasi, procurement, retail, logistics, tourism, dan ekspor melalui standard serta contract.

Tahap 6: Asset and Innovation (2030-2040)

Perluas equity, equipment finance, pension, IP, R&D, brand, dan data ownership.

Tahap 7: Productive People's Economy 2045 (2035-2045)

Bangun ekonomi rakyat yang didominasi usaha produktif, koperasi profesional, perusahaan menengah, dan jaringan lokal-global.

Dua Puluh Rekomendasi Prioritas

1. Segmentasikan kebijakan UMKM berdasarkan tujuan dan tahap usaha.
2. Berhenti mengukur keberhasilan terutama dari jumlah peserta program; ukur productivity dan graduation.
3. Bangun national business extension service dengan jaringan daerah.
4. Integrasikan pembukuan digital, payment, inventory, dan tax sederhana.
5. Hubungkan KUR dengan business development serta graduation pathway.
6. Kembangkan cash-flow lending dan guarantee dengan consumer/business protection.
7. Modernisasi koperasi melalui audit, professional management, digital member system, dan performance indicators.
8. Gunakan koperasi untuk fungsi ekonomi yang jelas: procurement, processing, marketing, finance, data, atau service.
9. Dorong supplier development pada BUMN, korporasi besar, dan kawasan industri.
10. Terapkan prompt payment standard bagi buyer besar dan pemerintah.
11. Bangun shared production facility dan laboratory berbasis demand.
12. Dorong UMKM masuk pasar melalui quality dan reliability, bukan proteksi permanen.
13. Perkuat data portability merchant agar tidak terkunci platform.
14. Sediakan panduan AI praktis untuk UMKM dan cooperative shared AI service.
15. Perluas childcare, mobility, dan asset support bagi pengusaha perempuan.

16. Bangun kota kecil dan desa sebagai hub agroprocessing, tourism, repair, digital service, dan logistics.
17. Gunakan public procurement sebagai pasar awal dengan standard yang realistis.
18. Dorong green productivity dan circular business pada UMKM.
19. Bangun export readiness program berbasis buyer dan product-market fit.
20. Terbitkan laporan tahunan Ekonomi Rakyat Naik Kelas dengan indikator produktivitas, aset, formalitas, koperasi, dan perusahaan menengah.

Implikasi bagi Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI)

IBM ASMI dapat mengembangkan pusat kajian Ekonomi Rakyat, UMKM, dan Koperasi yang menggabungkan manajemen, digital, finance, pemasaran, entrepreneurship, serta kebijakan publik.

Mahasiswa dapat menjalankan business clinic dengan UMKM untuk memperbaiki pencatatan, cash flow, inventory, digital marketing, quality, serta pricing. Project nyata memberi manfaat pendidikan sekaligus sosial.

Program MM dapat memasukkan Cooperative Management modern: governance, member economics, capital, audit, digitalization, dan supply chain.

PLS-SEM dapat digunakan untuk menguji pengaruh digital capability dan management practice terhadap business performance dengan market access sebagai mediator.

Riset koperasi dapat menguji pengaruh governance quality, trust, member participation, dan professional management terhadap cooperative performance.

Business analytics lab dapat membantu merchant memahami unit economics, customer retention, product mix, dan platform fee.

Executive education dapat melatih pengurus koperasi serta pemilik UMKM pada finance, AI, cybersecurity, procurement, dan succession.

IBM ASMI dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam maturity assessment UMKM dan evaluasi program berdasarkan outcome.

Kampus dapat membantu membangun cooperative digital dashboard yang sederhana dan transparan bagi anggota.

Agenda ini memperkuat posisi manajemen sebagai ilmu yang membantu ekonomi rakyat menjadi lebih produktif, bukan hanya ilmu bagi korporasi besar.

Glossarium

UMKM: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kategori usaha yang dibedakan menurut kriteria hukum dan ekonomi tertentu.

Ekonomi rakyat: Aktivitas ekonomi yang berbasis partisipasi luas masyarakat, usaha kecil, kerja mandiri, koperasi, dan kepemilikan lokal.

Koperasi: Badan usaha berbasis anggota yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama.

Livelihood enterprise: Usaha yang terutama berfungsi mempertahankan pendapatan rumah tangga dan tidak selalu berorientasi tumbuh.

Growth-oriented enterprise: Usaha yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk memperbesar pasar, tenaga kerja, aset, dan produktivitas.

Missing middle: Keterbatasan jumlah perusahaan menengah antara usaha mikro-kecil dan perusahaan besar.

Kenaikan kelas: Perubahan usaha menuju produktivitas, formalitas, kualitas, pasar, tenaga kerja, atau aset yang lebih tinggi.

Produktivitas: Output atau nilai tambah yang dihasilkan per unit input.

Business extension: Layanan pendampingan teknis dan manajerial untuk meningkatkan kemampuan perusahaan.

Management practice: Praktik pengelolaan target, monitoring, operasi, SDM, kualitas, dan keputusan.

Cash-flow lending: Pembiayaan yang menilai kemampuan bayar berdasarkan arus kas usaha.

KUR: Kredit Usaha Rakyat, program pembiayaan bagi usaha yang memenuhi ketentuan pemerintah.

Graduasi: Perpindahan usaha dari ketergantungan program bersubsidi menuju sistem pembiayaan dan pasar yang lebih komersial.

Digital maturity: Tahap kemampuan usaha menggunakan teknologi digital secara efektif.

Marketplace: Platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli.

Platform economy: Kegiatan ekonomi yang dimediasi platform digital dengan network effects.

Data portability: Kemampuan pengguna memindahkan data dari satu layanan ke layanan lain.

Supplier development: Program peningkatan kemampuan pemasok agar memenuhi kebutuhan buyer.

Prompt payment: Pembayaran kepada pemasok sesuai waktu yang disepakati tanpa keterlambatan yang tidak wajar.

Shared facility: Fasilitas produksi, laboratorium, logistik, atau teknologi yang digunakan bersama.

Traceability: Kemampuan melacak asal, proses, dan pergerakan produk.

Export readiness: Tingkat kesiapan usaha memenuhi tuntutan pasar internasional.

Cooperative governance: Sistem pengambilan keputusan, pengawasan, akuntabilitas, dan hubungan anggota dalam koperasi.

Member patronage: Penggunaan atau transaksi ekonomi anggota dengan koperasi.

Collective bargaining power: Daya tawar yang diperoleh melalui tindakan bersama.

Circular economy: Sistem ekonomi yang menjaga nilai produk dan material melalui reuse, repair, remanufacture, dan recycling.

Green productivity: Peningkatan produktivitas yang sekaligus mengurangi energi, material, limbah, atau emisi.

Social enterprise: Usaha yang menggabungkan model pendapatan dengan tujuan sosial atau lingkungan.

Formalization: Proses masuknya usaha atau kerja ke sistem formal legal, pajak, administrasi, dan perlindungan.

Business resilience: Kemampuan usaha bertahan dan pulih dari guncangan.

Unit economics: Analisis pendapatan dan biaya pada unit transaksi atau produk untuk menilai keberlanjutan model bisnis.

Daftar Pustaka

- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). Poor economics. PublicAffairs.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2005). Financial and legal constraints to growth: Does firm size matter? *Journal of Finance*, 60(1), 137-177. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00727.x>
- Birchall, J. (2004). Cooperatives and the Millennium Development Goals. International Labour Office.
- Bloom, N., & Van Reenen, J. (2007). Measuring and explaining management practices across firms and countries. *Quarterly Journal of Economics*, 122(4), 1351-1408. <https://doi.org/10.1162/qjec.2007.122.4.1351>
- Bloom, N., Eifert, B., Mahajan, A., McKenzie, D., & Roberts, J. (2013). Does management matter? Evidence from India. *Quarterly Journal of Economics*, 128(1), 1-51. <https://doi.org/10.1093/qje/qjs044>
- De Mel, S., McKenzie, D., & Woodruff, C. (2008). Returns to capital in microenterprises: Evidence from a field experiment. *Quarterly Journal of Economics*, 123(4), 1329-1372. <https://doi.org/10.1162/qjec.2008.123.4.1329>
- Fafchamps, M., McKenzie, D., Quinn, S., & Woodruff, C. (2014). Microenterprise growth and the flypaper effect. *Journal of Development Economics*, 106, 211-226. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2013.10.010>
- Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78-104. <https://doi.org/10.1080/09692290500049805>
- International Labour Organization. (2018). Women and men in the informal economy: A statistical picture (3rd ed.). ILO.
- International Labour Organization. (2002). Recommendation No. 193 concerning the promotion of cooperatives. ILO.
- McKenzie, D., & Woodruff, C. (2017). Business practices in small firms in developing countries. *Management Science*, 63(9), 2967-2981. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2016.2492>
- McKenzie, D. (2021). Small business training to improve management practices in developing countries. *World Bank Research Observer*, 36(1), 1-35. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkaa007>
- North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>
- Ostrom, E. (1990). Governing the commons. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Harvard University Press.
- Stiglitz, J. E. (2009). Moving beyond market fundamentalism to a more balanced economy. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 80(3), 345-360. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8292.2009.00389.x>

- Tambunan, T. T. H. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9, 18. <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4>
- World Bank. (2021). Beyond unicorns: Harnessing digital technologies for inclusion in Indonesia. World Bank. <https://doi.org/10.1596/36018>
- World Bank. (2020). World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1457-0>
- OECD. (2023). SME and entrepreneurship outlook 2023. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/342b8564-en>
- OECD. (2024). Financing SMEs and entrepreneurs 2024. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/fa521246-en>
- Badan Pusat Statistik. (2026). Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026). Ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y). BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026). Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026). Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026). Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Jawa Barat 2024. BPS.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Catatan Data Mutakhir 2025-2026

Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen, dengan PDB atas dasar harga berlaku Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita Rp83,7 juta. Pulau Jawa menyumbang 56,93 persen terhadap ekonomi nasional pada 2025.

Pada triwulan I-2026 ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Struktur spasial tetap terkonsentrasi di Jawa yang menyumbang sekitar 57,24 persen terhadap ekonomi pada periode tersebut.

Tingkat kemiskinan September 2025 tercatat 8,25 persen atau 23,36 juta orang. Kemiskinan perdesaan sebesar 10,72 persen masih lebih tinggi daripada perkotaan 6,60 persen, sehingga produktivitas ekonomi rakyat perdesaan tetap sangat relevan.

Gini Ratio pengeluaran September 2025 tercatat 0,363, turun dari 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024. Pangsa pengeluaran 40 persen terbawah mencapai 19,28 persen.

Publikasi BPS tentang industri mikro dan kecil secara konsisten menempatkan informasi mengenai jumlah usaha, tenaga kerja, balas jasa pekerja, pendapatan, permodalan, kesulitan usaha, kemitraan, penggunaan internet, dan pemasaran sebagai komponen penting untuk memahami kondisi IMK. Kerangka ini menunjukkan bahwa kualitas data usaha perlu mencakup kemampuan dan kinerja, bukan hanya jumlah unit.

Penutup Reflektif

Ekonomi rakyat sering dipuji sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Pujian tersebut baru bermakna bila diterjemahkan ke agenda peningkatan kemampuan, bukan hanya perlindungan.

UMKM bukan satu kategori tunggal. Sebagian adalah strategi bertahan hidup, sebagian bisnis keluarga yang stabil, sebagian perusahaan bertumbuh, dan sebagian calon eksportir. Kebijakan harus melihat perbedaan ini.

Koperasi juga tidak otomatis unggul karena bentuk hukumnya. Koperasi menjadi kuat ketika memecahkan masalah ekonomi nyata bagi anggota melalui skala, bargaining, data, dan ownership.

Profesionalisme bukan lawan nilai koperasi. Justru audit, management, technology, dan discipline menjaga aset anggota serta memungkinkan koperasi bertahan.

Produktivitas harus menjadi pusat karena usaha dengan produktivitas tinggi mampu membayar upah, berinvestasi, membangun aset, dan bertahan terhadap shock.

Pembiayaan perlu mengikuti produktivitas. Kredit murah tanpa pasar dan manajemen dapat menjadi beban, sementara usaha sehat yang kekurangan modal kehilangan peluang.

Digitalisasi harus dipahami sebagai transformasi proses. Payment dan marketplace adalah awal; pencatatan, inventory, customer data, analytics, dan integration merupakan tahap berikut.

AI memberi peluang baru karena kemampuan yang dahulu mahal dapat diakses melalui cloud. Namun UMKM tetap membutuhkan literasi, data, serta judgement untuk memeriksa hasil.

Platform memberi pasar sekaligus dependency. Merchant perlu menjaga brand, margin, data, dan kemampuan multi-channel.

Supplier development menghubungkan ekonomi rakyat dengan hilirisasi dan investasi besar. Kontrak, quality, forecast, serta prompt payment dapat mengubah perusahaan kecil menjadi perusahaan menengah.

Perusahaan menengah merupakan missing middle yang sangat strategis. Mereka menyerap manager dan teknisi, menjadi supplier, melakukan ekspor, dan membayar pajak lebih besar.

Ekonomi desa membutuhkan lebih dari transfer. Agroprocessing, logistics, tourism, digital service, repair, renewable, dan koperasi memberi basis produktif.

Kota kecil dapat menjadi hub antara desa dan pasar besar. Universitas, hospital, warehouse, finance, dan connectivity memperkuat peran tersebut.

Perempuan membutuhkan kebijakan yang melihat care, asset, safety, dan mobility, bukan hanya pinjaman.

Pemuda membutuhkan jalur belajar melalui apprenticeship, mentor, customer, dan kegagalan yang tidak destruktif.

Ekonomi hijau membuka peluang usaha baru pada repair, recycling, clean energy, food, biomass, efficiency, dan tourism berkelanjutan.

Koperasi dapat memainkan peran pada transisi hijau melalui ownership energi, waste, atau resource management, tetapi governance tetap kunci.

Pemerintah daerah harus bergerak dari penyelenggara seminar menuju provider business environment, data, licensing, market, dan extension.

Perguruan tinggi dapat menjadi sumber kemampuan manajemen yang selama ini kurang tersedia bagi usaha kecil. Mahasiswa dan dosen dapat membawa analisis, teknologi, dan standard ke lapangan.

IBM ASMI memiliki posisi yang relevan untuk mengembangkan manajemen ekonomi rakyat karena kompetensi bisnis dan multimedia dapat membantu digital market, analytics, komunikasi, serta governance.

Pada 2045, keberhasilan ekonomi rakyat tidak seharusnya diukur dari apakah jumlah usaha mikro tetap sangat besar. Ukuran yang lebih baik adalah apakah lebih banyak usaha produktif, lebih banyak perusahaan menengah, lebih banyak koperasi profesional, dan lebih banyak rumah tangga memiliki aset.

Ekonomi rakyat yang sehat memberi masyarakat pilihan. Seseorang dapat menjadi pekerja formal, entrepreneur, anggota koperasi, freelancer, atau pemilik usaha tanpa terjebak satu bentuk karena tidak ada alternatif.

Pemerintah perlu menjaga safety net bagi livelihood enterprise sambil menciptakan ladder bagi growth enterprise. Perlindungan dan upgrading tidak boleh dicampur secara tidak jelas.

Setiap program UMKM perlu memiliki graduation logic. Bila peserta terus kembali ke program dasar selama bertahun-tahun, capability mungkin tidak tumbuh.

Data menjadi fondasi. Pemerintah perlu mengetahui tahap usaha, bukan hanya nomor registrasi. Bank perlu melihat cash flow, koperasi perlu melihat transaksi anggota, dan pemilik perlu melihat margin.

Trust juga menjadi modal ekonomi. Koperasi membutuhkan trust antara anggota, usaha membutuhkan trust buyer, dan platform membutuhkan trust pengguna. Governance yang baik mengubah trust menjadi aset.

Ekonomi rakyat adalah tempat di mana pertumbuhan bertemu pemerataan secara langsung. Ketika produktivitas meningkat pada jutaan unit, manfaat tersebar melalui pendapatan, pekerjaan, aset, dan komunitas.

Karena itu, agenda UMKM dan koperasi bukan agenda pinggiran. Ia adalah strategi inti untuk membangun basis produktif nasional yang luas.

Indonesia yang kuat bukan hanya memiliki korporasi besar, tetapi jaringan perusahaan kecil dan menengah yang efisien, koperasi yang dipercaya, serta masyarakat yang memiliki kemampuan berusaha.

Tujuan akhirnya adalah ekonomi rakyat yang tidak selamanya meminta perlindungan, tetapi mampu menciptakan nilai, bernegosiasi, berinovasi, dan membangun aset.

Ketika itu terjadi, UMKM, koperasi, dan ekonomi rakyat benar-benar menjadi fondasi peningkatan ekonomi Indonesia: fondasi yang luas, produktif, inklusif, dan tahan lama.

Catatan Penulis

Artikel ini disusun untuk kepentingan pengajaran, diskusi akademik, dan pengembangan kebijakan pada Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI). Naskah menempatkan UMKM, koperasi, dan ekonomi rakyat dalam kerangka peningkatan produktivitas, pemerataan aset, transformasi digital, serta pembangunan wilayah.

Pendalaman Sektoral dan Agenda Implementasi

A. UMKM Pangan dan Rantai Nilai Lokal

UMKM pangan merupakan salah satu bentuk ekonomi rakyat yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mereka menghubungkan petani, pedagang bahan baku, pengolah, distributor, pasar tradisional, ritel

modern, dan konsumen. Nilai tambah dapat meningkat melalui pengolahan, standardisasi, kemasan, cold chain, serta pengembangan merek.

Tantangan utama UMKM pangan adalah konsistensi mutu. Banyak usaha menghasilkan produk yang baik secara rasa tetapi belum memiliki standard bahan baku, ukuran, shelf life, kebersihan, atau dokumentasi. Ketika usaha ingin masuk ritel modern atau ekspor, variasi kualitas menjadi hambatan.

Shared kitchen dan laboratory dapat menurunkan fixed cost untuk sertifikasi, pengujian, dan produksi. Fasilitas bersama harus memiliki business model, utilization target, dan governance; fasilitas gratis yang jarang digunakan menjadi pemborosan.

Digital demand forecasting membantu mengurangi food waste dan stockout. Namun data penjualan perlu dicatat secara konsisten. Penggunaan aplikasi sederhana lebih berguna daripada sistem kompleks yang tidak dipakai.

Hubungan dengan petani dapat diperkuat melalui kontrak, koperasi, atau aggregator sehingga mutu bahan baku lebih stabil. Mekanisme harga perlu transparan agar upgrading UMKM juga meningkatkan pendapatan produsen.

B. UMKM Pertanian dan Jasa Mekanisasi

Transformasi pertanian tidak selalu berarti petani membeli semua mesin sendiri. Service provider lokal dapat menyewakan traktor, drone, harvester, dryer, atau sensor sehingga skala ekonomi tercapai tanpa beban investasi besar bagi petani kecil.

Model jasa mekanisasi membuka peluang UMKM baru di desa. Pelaku membutuhkan teknisi, spare part, jadwal, pembiayaan aset, dan sistem booking. Koperasi dapat menjadi pemilik bersama atau platform penyedia layanan.

Pembiayaan mesin harus disesuaikan dengan seasonality cash flow. Kredit dengan cicilan bulanan tetap dapat tidak cocok bagi usaha yang pendapatannya mengikuti musim panen.

Data penggunaan mesin membantu menghitung utilization, maintenance, dan payback. Ini membuka peluang pembiayaan berbasis aset dan arus kas.

Jasa pertanian modern juga dapat menciptakan pekerjaan teknis bagi pemuda desa sehingga mereka tidak harus meninggalkan wilayah untuk memperoleh pekerjaan produktif.

C. UMKM Peternakan dan Koperasi Produksi

Peternakan rakyat menghadapi tantangan skala, feed cost, penyakit, kualitas, dan akses pasar. Koperasi dapat mengagregasi input, veterinary service, data produksi, collection, dan penjualan.

Quality-based payment memberi insentif anggota meningkatkan mutu, tetapi metode pengujian harus dipercaya. Transparency menjadi penting agar anggota menerima perbedaan harga sebagai hasil kualitas, bukan favoritisme.

Feed merupakan komponen biaya besar. Collective procurement dan formulation dapat menurunkan biaya bila volume cukup. Namun cooperative inventory perlu working capital serta control.

Data kesehatan ternak dan produksi dapat digunakan untuk early detection penyakit serta breeding decision. Digital tool sederhana dapat memberi nilai bila peternak memperoleh manfaat langsung.

Processing seperti susu pasteurisasi, keju, yoghurt, daging olahan, atau compost dapat memperluas nilai tambah, tetapi koperasi harus menilai market sebelum berinvestasi pada fasilitas.

D. UMKM Perikanan Budidaya

Budidaya ikan dan udang adalah sektor ekonomi rakyat dengan kebutuhan modal kerja, feed, quality water, disease management, dan akses pembeli. Collective input purchase dan technical assistance dapat memperbaiki survival rate.

Digital pond monitoring memiliki potensi, tetapi sensor perlu reliability dan service lokal. Teknologi yang rusak tanpa teknisi akan cepat ditinggalkan.

Koperasi atau kelompok dapat mengelola cold chain dan harvest schedule agar penjualan tidak terjadi serentak ketika harga rendah.

Traceability semakin penting bagi pasar premium. Data produksi perlu sederhana dan tidak membebani petani terlalu banyak.

Insurance atau risk-sharing dapat membantu menghadapi disease outbreak, tetapi produk perlu didasarkan pada data serta incentive yang mengurangi moral hazard.

E. UMKM Kerajinan dan Industri Kreatif

Kerajinan memiliki kekuatan pada identitas lokal, desain, dan keterampilan tangan. Tantangan utama adalah mengubah produk unik menjadi bisnis yang konsisten tanpa kehilangan karakter.

Design development, packaging, photography, storytelling, dan digital catalog dapat meningkatkan willingness to pay. Namun produk tetap harus memiliki quality control dan delivery reliability.

Koperasi atau asosiasi dapat menggabungkan material procurement serta showroom, tetapi brand individual dan collective brand perlu diatur agar tidak saling melemahkan.

Intellectual property pada motif dan desain perlu dikelola dengan sensitif terhadap pengetahuan komunal. Komersialisasi budaya sebaiknya memiliki benefit-sharing bila relevan.

Ekspor niche dapat dilakukan melalui distributor atau cross-border platform, tetapi usaha perlu memahami shipping, return, customs, dan customer expectation.

F. UMKM Jasa Konstruksi

Usaha jasa konstruksi kecil berperan besar pada perumahan, renovasi, dan proyek lokal. Tantangan mereka meliputi cash flow, tender, safety, skilled labor, dan project management.

Prompt payment menjadi sangat penting karena kontraktor kecil sering harus membiayai material serta pekerja sebelum pembayaran diterima. Retention dan variation order yang tidak jelas dapat menekan usaha.

Digital project management sederhana membantu jadwal, budget, material, dan dokumentasi. Namun sistem harus mudah digunakan pekerja lapangan.

Certification dan safety training membuka akses proyek lebih besar. Shared equipment rental dapat mengurangi kebutuhan capital.

Pengadaan pemerintah dapat menjadi pasar, tetapi tender perlu proportional agar perusahaan kecil yang berkualitas tidak otomatis tersingkir oleh syarat pengalaman yang berlebihan.

G. UMKM Jasa Kesehatan dan Care Economy

Apotek, klinik kecil, laboratorium, caregiver, home care, dan penyedia alat kesehatan merupakan bagian ekonomi rakyat dengan standar profesional yang tinggi. Kualitas dan patient safety harus menjadi prioritas.

Care economy akan berkembang seiring ageing dan perubahan struktur keluarga. Koperasi caregiver atau worker cooperative dapat menyediakan training, scheduling, insurance, dan bargaining yang lebih baik.

Digital booking dan teleconsultation dapat memperluas akses, tetapi privacy dan clinical governance perlu kuat.

Pembiayaan usaha health tidak dapat hanya menggunakan indikator omzet karena regulatory compliance dan equipment maintenance penting.

Ekonomi care menunjukkan bahwa jasa yang berorientasi manusia juga dapat menjadi sumber pekerjaan produktif bila standard, training, dan payment model baik.

H. Koperasi Simpan Pinjam dan Tata Kelola Risiko

Koperasi simpan pinjam dapat memberi akses keuangan bagi anggota yang kurang terlayani, tetapi fungsi intermediasi membawa risiko tinggi. Kegagalan governance dapat langsung merugikan tabungan anggota.

Prinsip kehati-hatian, audit, liquidity management, provisioning, related-party rule, dan fit-and-proper management menjadi sangat penting.

Digital ledger serta core system dapat meningkatkan control, tetapi cyber risk juga bertambah. Koperasi kecil dapat menggunakan shared infrastructure dengan standard keamanan.

Anggota perlu memahami bahwa return tinggi selalu terkait risiko. Transparansi mengenai kesehatan keuangan tidak boleh dikalahkan oleh keinginan membayar SHU atau imbal hasil besar.

Koperasi keuangan yang sehat dapat menjadi jembatan menuju formal finance, bukan menjadi ruang arbitrase regulasi.

I. Koperasi Produsen sebagai Aggregator

Koperasi produsen memperoleh kekuatan ketika mampu menggabungkan volume dan quality anggota sehingga memenuhi kebutuhan buyer yang lebih besar. Aggregation perlu mencakup schedule, grading, packaging, dan logistics.

Buyer tidak hanya mencari harga rendah; reliability sering lebih penting. Koperasi perlu membangun buffer stock, quality control, dan information system.

Kontrak dengan buyer harus transparan kepada anggota. Risiko harga, rejection, dan payment delay perlu dibagi dengan aturan yang diketahui.

Professional sales team dapat meningkatkan market access. Pengurus demokratis tidak harus melakukan seluruh fungsi operasional.

Keberhasilan aggregator terlihat ketika anggota memperoleh market yang lebih stabil dan memiliki incentive meningkatkan produktivitas.

J. Koperasi Konsumen dan Kekuatan Pembelian

Koperasi konsumen dapat menurunkan harga atau meningkatkan kualitas barang dan layanan melalui collective purchasing. Model ini relevan pada pangan, housing, energy, insurance, dan berbagai layanan.

Scale demand dapat digunakan untuk negosiasi supplier, tetapi inventory dan retail operation harus profesional. Koperasi tidak otomatis lebih efisien dari retailer swasta.

Digital membership dan purchase history membantu loyalty serta demand planning, namun data anggota perlu dilindungi.

Surplus dapat dikembalikan sesuai transaksi atau diinvestasikan pada layanan anggota. Kebijakan kapitalisasi perlu jelas.

Koperasi konsumen juga dapat menjadi saluran produk UMKM lokal jika quality serta pricing kompetitif.

K. Koperasi Pekerja dan Masa Depan Kerja

Worker cooperative memberi pekerja kepemilikan bersama atas perusahaan. Model ini dapat relevan pada jasa profesional, kreatif, platform, care, repair, atau bisnis yang mengalami succession.

Kepemilikan pekerja dapat meningkatkan engagement, tetapi decision-making perlu dibedakan antara keputusan strategis dan operasional. Demokrasi tidak berarti seluruh keputusan harian melalui voting.

Capital accumulation menjadi tantangan karena anggota mungkin memiliki modal terbatas. Retained earnings dan external debt tetap dibutuhkan.

Worker cooperative juga dapat menjadi solusi ketika pemilik usaha pensiun dan ingin menjual kepada pekerja, menjaga pekerjaan serta knowledge.

Model ini memperluas bentuk kepemilikan ekonomi rakyat di luar usaha keluarga.

L. Koperasi Platform

Platform cooperative menggunakan teknologi digital dengan kepemilikan atau kontrol oleh pengguna seperti driver, freelancer, merchant, atau konsumen. Tujuannya menggabungkan efisiensi platform dengan pembagian nilai yang lebih luas.

Tantangannya besar karena platform memerlukan scale, software, capital, customer acquisition, dan network effect. Cooperative platform tidak cukup hanya memiliki nilai sosial.

Interoperability dan open-source technology dapat menurunkan fixed cost. Federation antar-koperasi juga dapat memperluas network.

Governance data menjadi keunggulan potensial karena anggota dapat menentukan bagaimana data digunakan.

Platform cooperative paling realistis pada niche atau jaringan yang memiliki komunitas kuat dan problem ekonomi jelas.

M. Regenerasi Kepemimpinan Koperasi

Banyak koperasi menghadapi masalah succession karena pengurus lama bertahan lama dan talenta muda tidak masuk. Regenerasi perlu dirancang melalui leadership pipeline dan professional career.

Anak muda sering melihat koperasi sebagai institusi lama. Digitalization, transparency, dan real economic opportunity dapat mengubah persepsi.

Board training berbeda dari management training. Pengurus perlu memahami governance, strategy, dan oversight, sementara manajer membutuhkan operational competence.

Term limit dapat mendorong regenerasi, tetapi perlu menjaga institutional memory.

Mentoring antara pengurus senior dan generasi baru dapat menggabungkan trust community dengan business capability.

N. Pengawasan dan Kesehatan Koperasi

Jumlah koperasi aktif bukan ukuran cukup. Kesehatan perlu dinilai dari member activity, cash flow, governance, audit, capital, dan service quality.

Early warning system dapat menggunakan data laporan untuk mendeteksi anomaly, tetapi supervisory capacity tetap diperlukan.

Regulatory burden harus proporsional dengan risiko. Koperasi produsen kecil tidak memerlukan aturan keuangan seberat koperasi simpan pinjam.

Public disclosure sederhana dapat membantu anggota menilai kondisi koperasi. Transparansi internal merupakan perlindungan pertama.

Penutupan koperasi yang tidak aktif juga perlu mudah agar data nasional tidak dipenuhi entitas nominal.

O. Ekonomi Rakyat dan Kepemilikan Aset

Tujuan akhir pemberdayaan ekonomi bukan hanya meningkatkan omzet, tetapi meningkatkan net assets rumah tangga dan usaha. Aset memberi resilience dan kemampuan berinvestasi.

Usaha dapat membangun aset melalui equipment, inventory sehat, brand, customer list, IP, cash reserve, dan property. Tidak semua aset bersifat fisik.

Koperasi memungkinkan ownership kolektif terhadap warehouse, cold storage, machinery, retail, atau platform yang terlalu mahal jika dimiliki individu.

Financial reporting perlu mencatat depreciation dan maintenance agar aset tidak tampak bertambah sementara kualitasnya menurun.

Asset-building membuat ekonomi rakyat lebih tahan shock dan memperluas kelas menengah.

P. Ekonomi Rakyat dan Pajak

Perpajakan usaha kecil perlu sederhana, predictable, dan proporsional. Sistem yang rumit mendorong informalitas dan menciptakan ketergantungan pada intermediaries.

Namun formalitas pajak juga memberi rekam usaha yang berguna bagi kredit, kontrak, dan ekspor. Tax compliance dapat menjadi bagian upgrading.

Threshold perlu dirancang agar usaha tidak sengaja membatasi pertumbuhan. Transisi ke sistem yang lebih kompleks sebaiknya gradual.

Digital invoicing dapat membantu tetapi harus sesuai kapasitas usaha dan tersedia bantuan.

Tax morale UMKM meningkat bila mereka melihat layanan, perlindungan, serta akses yang nyata.

Q. Perlindungan Sosial bagi Wirausaha dan Pekerja Mandiri

Pemilik usaha mikro juga menghadapi sakit, kecelakaan, ageing, dan income shock. Social protection sering lebih sulit karena tidak ada employer yang membayar kontribusi.

Kontribusi fleksibel dan digital dapat meningkatkan coverage. Koperasi atau platform dapat menjadi aggregator pembayaran tanpa menguasai hak peserta.

Insurance income interruption dapat membantu, tetapi produk masih sulit karena income informal volatil.

Pension micro-saving penting untuk menghindari kemiskinan usia tua pada pelaku usaha.

Ekonomi rakyat yang produktif tetap membutuhkan safety net agar shock tidak menghancurkan aset yang dibangun bertahun-tahun.

R. Ketahanan Bencana bagi UMKM

UMKM sangat rentan terhadap banjir, kebakaran, gempa, pandemi, atau supply disruption karena buffer rendah. Business continuity planning sering dianggap urusan perusahaan besar, padahal versi sederhana sangat relevan.

Backup data, emergency cash reserve, supplier alternatif, insurance, dan contact list dapat mempercepat recovery.

Kawasan pasar serta sentra industri memerlukan disaster plan kolektif. Koperasi atau asosiasi dapat mengelola mutual support.

Government relief sebaiknya memiliki mekanisme cepat berbasis registrasi usaha tanpa prosedur berat.

Resilience merupakan bagian produktivitas jangka panjang karena usaha yang sering kembali ke nol sulit naik kelas.

Tiga Puluh Indikator Kenaikan Kelas Ekonomi Rakyat

1. Proporsi usaha yang memiliki pencatatan keuangan rutin.
2. Proporsi usaha dengan rekening terpisah dari rumah tangga.
3. Persentase usaha yang memiliki legal identity sesuai tahap.
4. Pertumbuhan omzet riil per pekerja.
5. Pertumbuhan value added per pekerja.
6. Margin operasi setelah memperhitungkan biaya platform dan logistik.
7. Proporsi usaha dengan cash reserve minimum.
8. Proporsi usaha yang memperoleh pembiayaan berbasis arus kas.
9. Tingkat graduasi dari kredit bersubsidi ke pembiayaan komersial.
10. Tingkat kredit bermasalah menurut segmen usaha.
11. Proporsi UMKM yang memakai digital payment.
12. Proporsi yang memakai digital bookkeeping atau ERP ringan.
13. Proporsi yang menggunakan data untuk inventory atau pricing.
14. Persentase usaha dengan sertifikasi yang benar-benar membuka pasar.
15. Proporsi supplier UMKM dalam procurement korporasi besar.
16. Rata-rata waktu pembayaran buyer kepada supplier kecil.
17. Jumlah perusahaan mikro yang naik ke kecil dan kecil ke menengah.
18. Survival rate usaha bertumbuh setelah tiga dan lima tahun.
19. Proporsi UMKM yang menjual ke luar provinsi.
20. Proporsi UMKM yang melakukan ekspor langsung atau tidak langsung.
21. Jumlah koperasi dengan audited financial statements.
22. Rasio transaksi anggota terhadap total bisnis koperasi.

23. Tingkat partisipasi anggota dalam governance.
24. Produktivitas anggota sebelum dan sesudah bergabung koperasi.
25. Pertumbuhan aset kolektif koperasi.
26. Proporsi pekerja UMKM yang tercakup jaminan sosial.
27. Proporsi usaha perempuan yang naik kelas.
28. Proporsi UMKM hijau yang menurunkan energi atau material intensity.
29. Local economic multiplier pada cluster UMKM.
30. Pertumbuhan net assets rumah tangga pelaku usaha.

Agenda Seratus Hari untuk Penguatan UMKM dan Koperasi

1. Membentuk segmentasi nasional UMKM berdasarkan livelihood dan growth potential.
2. Menetapkan indikator graduation yang seragam lintas program.
3. Mengintegrasikan business clinic dengan KUR pada wilayah pilot.
4. Membangun prompt-payment commitment pada BUMN dan pengadaan pemerintah.
5. Menetapkan 20 cluster supplier development berbasis proyek investasi nyata.
6. Meluncurkan cooperative governance diagnostic untuk koperasi aktif.
7. Mendorong digital member ledger dan laporan keuangan standar koperasi.
8. Menyediakan business bookkeeping template gratis yang interoperabel.
9. Menyiapkan shared AI assistant untuk koperasi dan UMKM dengan panduan keamanan.
10. Mengembangkan maturity assessment digital yang sederhana.
11. Menetapkan program shared laboratory berdasarkan kebutuhan pasar.
12. Mengidentifikasi koperasi pertanian/perikanan yang layak menjadi aggregator.
13. Membentuk pilot cash-flow lending dengan data portability.
14. Membuat dashboard pembayaran pengadaan pemerintah kepada UMKM.
15. Mengembangkan program eksportir baru berbasis buyer matching.
16. Menetapkan paket childcare dan entrepreneurship bagi perempuan pada cluster tertentu.
17. Membuka apprenticeship entrepreneur bagi pemuda pada perusahaan menengah.
18. Melakukan energy/resource audit ringan pada UMKM produksi.
19. Menyusun disaster resilience checklist bagi usaha kecil.
20. Menerbitkan laporan publik tahunan tentang produktivitas dan kenaikan kelas UMKM.

Dua Puluh Pertanyaan bagi Pengurus Koperasi dan Pemilik UMKM

1. Apakah masalah ekonomi utama yang ingin diselesaikan sudah jelas?
2. Apakah usaha memperoleh laba setelah semua biaya dihitung?

3. Apakah uang usaha terpisah dari uang rumah tangga?
4. Produk mana yang benar-benar menghasilkan margin?
5. Pelanggan mana yang paling menguntungkan dan paling loyal?
6. Apakah inventory terlalu besar atau sering stockout?
7. Apakah kualitas konsisten tanpa kehadiran pemilik?
8. Apakah teknologi menghemat waktu atau hanya menambah biaya?
9. Apakah kredit menghasilkan arus kas tambahan yang cukup?
10. Apakah usaha memiliki cash reserve untuk shock?
11. Apakah ada jalur bagi pekerja menjadi lebih terampil dan dibayar lebih baik?
12. Apakah buyer membayar tepat waktu?
13. Apakah koperasi benar-benar digunakan anggota?
14. Apakah pengurus dan manajer memiliki peran yang jelas?
15. Apakah laporan keuangan dipahami anggota?
16. Apakah anggota menerima manfaat ekonomis yang dapat diukur?
17. Apakah usaha terlalu bergantung pada satu platform atau buyer?
18. Apakah data pelanggan dan transaksi dapat dipindahkan?
19. Apakah usaha membangun aset atau hanya meningkatkan omzet?
20. Apa capability baru yang dimiliki usaha dibanding tiga tahun lalu?

Penegasan Akhir: Ekonomi Rakyat sebagai Mesin Mobilitas

Ekonomi rakyat memiliki nilai paling besar ketika menjadi mesin mobilitas. Usaha mikro yang sehat dapat mengubah pendapatan harian menjadi tabungan, equipment, rumah, pendidikan anak, dan kesempatan kerja bagi orang lain.

Koperasi yang sehat dapat mengubah kelemahan individual menjadi kekuatan kolektif. Skala kecil anggota tidak lagi menjadi hambatan mutlak karena fungsi tertentu dilakukan bersama.

Namun romantisasi ekonomi kecil harus dihindari. Skala kecil sering berarti produktivitas, upah, dan buffer rendah. Tujuan pemberdayaan adalah memperbesar kemampuan, bukan mengabadikan keterbatasan.

Sebagian usaha memang memilih tetap kecil karena lifestyle atau karakter pasar. Itu tidak masalah selama produktif dan menghasilkan kehidupan layak.

Sebagian lain memiliki potensi tumbuh. Mereka membutuhkan akses yang berbeda: manager, engineer, finance, standard, software, supplier contract, dan export.

Program pemerintah perlu mengikuti heterogenitas tersebut. Bantuan dasar bagi livelihood enterprise tidak sama dengan scale-up finance bagi perusahaan bertumbuh.

Koperasi juga perlu memilih fungsi ekonomi yang spesifik. Koperasi yang hanya dibentuk karena program tanpa member need akan sulit hidup.

Member economics harus menjadi pusat: apakah biaya turun, harga naik, risiko terbagi, atau akses pasar membaik. Jika tidak ada manfaat ekonomi, partisipasi akan melemah.

Professional management penting karena ekonomi rakyat juga menghadapi competition. Nilai solidaritas perlu didukung kemampuan bisnis.

Digitalisasi dapat memperkuat transparansi koperasi dengan real-time member statement, voting, transaction history, dan dashboard.

AI dapat membantu analisis, tetapi trust tidak dapat diotomatisasi. Hubungan anggota, supplier, dan pelanggan tetap membutuhkan manusia.

Pasar modern membutuhkan standard. Sertifikasi tidak boleh menjadi tujuan administratif; ia harus terhubung buyer dan peningkatan proses.

Pembiayaan yang sehat membangun asset. Kredit konsumtif yang menyamar sebagai modal usaha justru dapat memperlemah rumah tangga.

Kebijakan finance perlu melihat debt capacity serta graduation, bukan hanya volume penyaluran.

Perusahaan besar dapat menjadi anchor transformation bila membuka supplier path. Procurement yang transparan dan technical assistance menciptakan learning.

Prompt payment merupakan kebijakan sederhana tetapi sangat penting karena modal kerja adalah constraint utama UMKM.

Ekspor memberi opportunity besar tetapi tidak semua usaha siap. Domestic market yang besar tetap merupakan tempat learning dan scale.

Ekonomi hijau membuka niche baru bagi repair, recycle, local food, eco-tourism, renewable service, dan low-waste production.

Perempuan dan pemuda perlu masuk bukan hanya pada sektor tradisional tetapi juga industrial, digital, creative, and professional services.

Ekonomi rakyat juga perlu social protection. Entrepreneurship tidak seharusnya berarti hidup tanpa perlindungan terhadap sakit, kecelakaan, dan usia tua.

Pada wilayah rural dan pesisir, koperasi dapat menjadi institutional infrastructure ketika pasar serta layanan tersebar.

Pada kota, koperasi pekerja, housing, platform, dan service dapat memberi bentuk baru ekonomi kolektif.

Perguruan tinggi dapat membantu menjaga agar program berbasis evidence. Business clinic dan applied research lebih bernilai daripada seminar satu arah.

IBM ASMI dapat menjadi model kampus yang menghubungkan manajemen dan multimedia dengan kebutuhan digitalisasi ekonomi rakyat.

Jika jutaan usaha memiliki manajemen lebih baik, efek agregat terhadap produktivitas nasional dapat sangat besar.

Jika lebih banyak usaha naik menjadi perusahaan menengah, struktur ekonomi menjadi lebih seimbang dan rantai nilai domestik lebih dalam.

Jika koperasi menjadi profesional, kepemilikan aset dan bargaining dapat tersebar lebih luas.

Jika ekonomi rakyat terhubung dengan hilirisasi, transformasi digital, dan ekonomi hijau, pemerataan tidak lagi bergantung pada transfer saja.

Rumah tangga akan memperoleh pendapatan melalui produksi, kepemilikan, serta partisipasi dalam jaringan ekonomi modern.

Pada titik itu, ekonomi rakyat menjadi fondasi kelas menengah produktif dan resilient.

Indonesia 2045 membutuhkan korporasi besar yang mampu bersaing global, tetapi juga jutaan perusahaan kecil-menengah serta koperasi yang mampu menjadi supplier, innovator, dan pemilik aset.

Struktur seperti itu lebih tahan terhadap shock karena sumber pendapatan tidak terkonsentrasi pada sedikit perusahaan atau wilayah.

Pertumbuhan juga memiliki legitimasi lebih kuat karena masyarakat melihat jalur partisipasi yang nyata.

Tujuan akhirnya adalah ekosistem di mana orang tidak perlu tetap kecil untuk menerima bantuan dan tidak perlu memiliki koneksi untuk memperoleh kesempatan.

Usaha dapat tumbuh karena quality dan capability; koperasi berkembang karena member value; pemerintah hadir melalui public goods; dan pasar memberi discipline.

Dengan arsitektur seperti itu, ekonomi rakyat bukan masa lalu yang dipertahankan, tetapi masa depan produktif yang dibangun.

UMKM, koperasi, dan ekonomi rakyat kemudian menjadi fondasi peningkatan ekonomi Indonesia dalam arti yang utuh: menghasilkan pertumbuhan, menyebarkan aset, memperkuat komunitas, serta memberi jutaan keluarga kemampuan menentukan masa depan mereka sendiri.

Suplemen Strategis: Menuju Ekosistem Ekonomi Rakyat yang Produktif

A. Dari Bantuan ke Ekosistem

Pendekatan pemberdayaan yang bertumpu pada bantuan sesaat sering menghasilkan ketergantungan program. Mesin, hibah, pelatihan, atau pameran hanya memberi manfaat jangka pendek bila tidak terhubung ke pasar dan peningkatan kemampuan. Ekosistem yang lebih kuat menyatukan legalitas, pembukuan, pembiayaan, teknologi, standard, buyer, logistics, serta perlindungan sosial.

Perubahan dari bantuan ke ekosistem juga menuntut koordinasi antarlembaga. Pelaku usaha sering menerima pelatihan dari banyak instansi tetapi tetap kesulitan memperoleh buyer atau modal kerja. Satu business profile yang dapat digunakan lintas program mengurangi duplikasi dan memungkinkan pendampingan berkelanjutan.

Program sebaiknya mempunyai entry, milestone, graduation, dan exit. Pelaku mengetahui kemampuan apa yang harus dibangun untuk berpindah tahap. Pemerintah kemudian dapat memusatkan sumber daya pada bottleneck yang benar-benar menghambat pertumbuhan.

Ekosistem yang matang menjadikan pasar dan produktivitas sebagai sumber keberlanjutan utama. Subsidi berfungsi sebagai katalis, bukan fondasi permanen.

B. Pendampingan yang Berbasis Diagnosis

Pendampingan UMKM sering dimulai dari modul yang sudah tersedia, bukan diagnosis bisnis. Padahal dua usaha dengan omzet sama dapat memiliki masalah berbeda: satu kekurangan demand, satu memiliki defect tinggi, satu mengalami cash-flow problem, dan satu kekurangan tenaga terampil.

Business diagnostic sederhana dapat membaca revenue, cost, margin, customer, inventory, process, people, digital, dan finance. Hasil diagnosis menentukan intervensi. Usaha yang belum memiliki pembukuan tidak membutuhkan AI; usaha yang memiliki demand tinggi tetapi capacity rendah memerlukan process improvement atau finance.

Pendamping juga harus memiliki sector knowledge. Advice generik tentang media sosial tidak cukup bagi supplier logam, peternak, atau pengolah ikan yang menghadapi standard teknis.

Outcome pendampingan perlu dicatat sebelum dan sesudah program. Dengan data tersebut, pemerintah dapat belajar intervensi mana yang benar-benar meningkatkan produktivitas.

C. Sertifikasi sebagai Jalan Masuk Pasar

Sertifikasi memiliki nilai ketika menjadi tiket menuju pasar yang lebih besar atau lebih bernilai. Jika sertifikat diperoleh tetapi tidak ada buyer, manfaatnya hanya administratif. Karena itu, program sertifikasi perlu dimulai dari kebutuhan pasar.

Usaha pangan membutuhkan food safety, halal, shelf-life, dan packaging; supplier industri membutuhkan quality system serta measurement; furniture membutuhkan legality dan sustainability; jasa profesional membutuhkan competency. Prioritas berbeda.

Biaya sertifikasi dapat diturunkan melalui shared laboratory dan collective preparation. Koperasi dapat mengkoordinasikan anggota agar audit dan dokumentasi lebih efisien.

Yang lebih penting daripada sertifikat adalah budaya mutu: proses konsisten, pencatatan, corrective action, dan customer feedback. Sertifikat seharusnya menjadi bukti sistem yang berjalan, bukan tujuan akhir.

D. Ekonomi Rakyat dan Logistik

Biaya logistik sangat menentukan daya saing UMKM karena volume pengiriman kecil membuat unit cost tinggi. Consolidation melalui koperasi, aggregator, atau shared warehouse dapat menurunkan biaya.

Digital logistics memungkinkan tracking, route planning, dan demand aggregation. Namun manfaat hanya muncul bila data pengiriman akurat dan layanan fisik reliable.

Daerah kepulauan menghadapi biaya yang lebih tinggi sehingga policy perlu mempertimbangkan hub, jadwal, cold chain, serta subsidi layanan tertentu bila memiliki manfaat publik besar.

Logistik juga memengaruhi cash conversion cycle. Barang yang lama di perjalanan menunda penerimaan pembayaran. Karena itu, perbaikan logistics memiliki efek langsung pada working capital.

E. Ekonomi Rakyat dan Perdagangan Tradisional

Pasar tradisional tetap menjadi infrastruktur ekonomi rakyat karena menghubungkan produsen kecil, pedagang, dan konsumen. Modernisasi perlu menjaga fungsi sosial serta affordability, bukan hanya memperbaiki bangunan.

Digital payment, inventory, waste management, hygiene, loading zone, dan market information dapat meningkatkan produktivitas pedagang. Namun desain perlu mudah dan tidak memaksa semua transaksi menjadi digital.

Pengelolaan pasar sebaiknya profesional, transparan, dan melibatkan pedagang. Retribusi harus terkait layanan yang benar-benar diterima.

Pasar dapat menjadi hub produk lokal, cold chain, recycling, dan logistics last-mile. Dengan pengelolaan modern, pasar tradisional tidak harus kalah dari retail modern.

F. Warung dan Mikro-Ritel

Warung memiliki keunggulan kedekatan dan hubungan sosial dengan konsumen. Digitalisasi distributor dan ordering dapat mengurangi stockout serta memperbaiki assortment.

Namun warung sering menghadapi margin tipis dan modal kerja kecil. Buy-now-pay-later untuk inventory dapat membantu tetapi juga meningkatkan risiko jika demand tidak stabil.

Data transaksi dapat digunakan untuk credit scoring, tetapi pemilik harus mengetahui bagaimana data digunakan dan dapat berpindah platform.

Koperasi retailer dapat mengagregasi pembelian sehingga harga lebih kompetitif tanpa menghilangkan kepemilikan individual.

G. BUMDes, Koperasi, dan Pembagian Peran

BUMDes dan koperasi sama-sama dapat beroperasi pada ekonomi lokal tetapi memiliki struktur kepemilikan berbeda. BUMDes berhubungan dengan pemerintah desa, sedangkan koperasi dimiliki anggota. Keduanya tidak perlu saling menggantikan.

Pembagian peran dapat dibuat berdasarkan aset dan fungsi. BUMDes dapat mengelola aset publik atau layanan tertentu, sedangkan koperasi mengagregasi aktivitas anggota. Kemitraan dapat menghindari duplikasi.

Governance menjadi krusial karena kedekatan dengan kekuasaan lokal dapat menciptakan conflict of interest. Transparansi kontrak dan laporan perlu.

Tujuan akhirnya adalah layanan dan productivity masyarakat, bukan memperbanyak entitas kelembagaan.

H. Ekonomi Rakyat dan Pariwisata Berkualitas

Pariwisata dapat menghasilkan multiplier besar bagi ekonomi rakyat melalui homestay, kuliner, transportasi, craft, guide, pertanian, dan event. Namun multiplier hanya muncul jika supply lokal terhubung.

Koperasi destinasi dapat mengelola booking, standard, conservation fee, dan promotion bersama. Governance perlu mencegah elite capture.

Visitor number bukan satu-satunya indikator. Value per visitor, length of stay, local spending, environmental load, dan income distribution lebih penting.

Digital platform destination dapat membantu direct booking, tetapi pengelola lokal perlu mempertahankan customer data serta brand.

I. Ekonomi Rakyat dan Perumahan

Koperasi perumahan dapat membantu anggota mengagregasi demand, memperoleh tanah, atau membangun hunian. Model ini memiliki sejarah panjang di berbagai negara.

Keuntungan utama adalah collective procurement dan control terhadap tujuan, tetapi development tetap membutuhkan expertise legal, finance, construction, dan property management.

Housing cooperative juga dapat mengelola rental atau shared facility untuk kelompok pekerja. Model tidak harus selalu kepemilikan individual.

Di Indonesia, potensi ini relevan bagi pekerja, professional association, dan komunitas urban bila didukung regulasi yang jelas.

J. Koperasi Energi dan Ketahanan Lokal

Energi terdesentralisasi membuka peluang kepemilikan kolektif. Koperasi dapat memiliki solar rooftop bersama, microgrid, biogas, atau service efficiency.

Model bisnis harus jelas: siapa membayar investasi, bagaimana tarif dihitung, siapa melakukan maintenance, dan bagaimana reserve dibentuk.

Keuntungan kolektif dapat menurunkan biaya energi sekaligus membangun aset komunitas. Namun proyek harus tetap mengikuti standard keselamatan dan sistem kelistrikan.

Koperasi energi menghubungkan ekonomi rakyat dengan transisi hijau secara langsung melalui ownership, bukan hanya konsumsi.

K. Ekonomi Rakyat dan Pengadaan Pemerintah

Belanja pemerintah dapat menjadi pasar yang stabil bagi usaha kecil, tetapi akses sering terhambat administrasi, ukuran paket, dan pembayaran. Reformasi procurement dapat menghasilkan multiplier lokal tanpa mengorbankan kualitas.

Paket dapat dipecah bila secara teknis rasional, sementara framework contract memberi kepastian demand. Digital procurement harus mudah dan memiliki bantuan.

Standard kualitas tidak boleh diturunkan hanya demi inclusion. Sebaliknya, supplier readiness perlu dibangun agar UMKM memenuhi standard.

Keberhasilan bukan jumlah kontrak semata tetapi supplier yang setelah memperoleh pengalaman pemerintah mampu menjual ke pasar lain.

L. Ekonomi Rakyat dan Korporasi Besar

Hubungan UMKM dengan korporasi dapat bergerak dari CSR menuju commercial partnership. Supplier kecil yang masuk proses bisnis inti memperoleh learning dan demand lebih kuat.

Perusahaan besar dapat membagikan forecast, standard, technical assistance, dan digital interface. Namun ketergantungan berlebihan pada satu buyer perlu dihindari.

Payment term yang panjang adalah hambatan serius. Supply-chain finance dapat membantu tetapi bukan alasan buyer memperpanjang pembayaran.

Corporate procurement juga dapat mencari innovation dari startup dan UMKM, bukan hanya commodity supplier.

M. Ekonomi Rakyat dan BUMN

BUMN memiliki jaringan serta procurement besar sehingga dapat menjadi anchor supplier development. Program perlu disusun berdasarkan kebutuhan teknis nyata, bukan target administratif.

BUMN dapat membuka testbed bagi teknologi lokal, tetapi quality serta safety tetap menjadi filter utama.

Data supplier lintas BUMN dapat membantu perusahaan kecil yang sudah teruji memperoleh pasar lebih luas.

Namun preferensi berlebihan dapat menciptakan supplier yang hanya hidup dari BUMN. Target akhir tetap competitiveness di pasar terbuka.

N. Koperasi Sekunder dan Federasi

Koperasi primer sering terlalu kecil untuk investasi processing, logistics, atau technology. Federasi atau koperasi sekunder dapat menggabungkan beberapa koperasi untuk mencapai scale.

Struktur federasi perlu menjaga accountability karena jarak antara anggota akhir dan pengurus bertambah. Reporting serta representation harus jelas.

Federasi dapat menyediakan audit, IT, marketing, legal, export, dan training yang terlalu mahal untuk koperasi kecil.

Digital network juga memungkinkan federation without excessive bureaucracy, asalkan standard data dan governance konsisten.

O. Data UMKM sebagai Infrastruktur Kebijakan

Data UMKM sering terfragmentasi menurut program dan lembaga. Registrasi belum tentu menggambarkan apakah usaha aktif, omzet, pekerja, atau tahap kematangan.

Data policy perlu membedakan administrative identity dari performance data. Tidak semua informasi harus dikumpulkan pemerintah; sebagian dapat diperoleh melalui survey atau consent-based sharing.

Unique business identifier membantu menghubungkan program, credit, procurement, dan statistics tanpa duplikasi.

Governance penting agar data tidak digunakan untuk tujuan yang tidak jelas. Kepercayaan pelaku usaha menentukan willingness berbagi data.

P. Mengukur Dampak Program UMKM

Program UMKM perlu menggunakan logic model yang menghubungkan input, activity, output, outcome, dan impact. Training hours adalah output; perubahan management practice adalah outcome; productivity dan income adalah impact.

Randomized evaluation tidak selalu mungkin, tetapi comparison group, before-after, atau phased rollout dapat memberi evidence lebih baik daripada testimonial.

Outcome perlu diukur cukup lama karena perubahan usaha membutuhkan waktu. Follow-up enam bulan dan dua tahun dapat berbeda.

Evaluasi juga perlu menghitung cost per successful graduation agar program dapat dibandingkan.

Q. Reformasi Kelembagaan Koperasi

Penguatan koperasi membutuhkan data yang memisahkan koperasi aktif secara legal dari koperasi aktif secara ekonomi. Volume transaksi anggota, audit, dan service usage lebih bermakna daripada nomor badan hukum.

Regulasi sebaiknya risk-based. Koperasi keuangan membutuhkan prudential supervision lebih kuat daripada koperasi produksi sederhana.

Professional manager perlu mendapat career path serta compensation yang kompetitif. Koperasi yang hanya mengandalkan relawan sulit scale.

Member education tetap penting agar demokrasi tidak berubah menjadi formalitas tanpa informed participation.

R. Ekonomi Rakyat dan Pendidikan Bisnis

Pendidikan bisnis untuk UMKM perlu menggunakan bahasa dan kasus yang relevan, bukan memindahkan kurikulum korporasi besar secara langsung.

Konsep seperti cash flow, contribution margin, inventory turnover, customer retention, dan break-even dapat diajarkan melalui data usaha sendiri.

Peer learning sering efektif karena pelaku belajar dari masalah nyata rekan sejawat. Koperasi atau asosiasi dapat menjadi komunitas pembelajaran.

Digital microlearning memudahkan akses, tetapi coaching diperlukan ketika keputusan memiliki konsekuensi besar.

S. Koperasi dan Demokrasi Ekonomi

Koperasi membawa gagasan demokrasi ekonomi karena pengguna juga pemilik dan memiliki suara. Namun demokrasi ekonomi tidak berarti menolak efisiensi atau keahlian.

Nilai demokrasi muncul ketika anggota dapat memahami informasi, mengawasi pengurus, dan menentukan arah strategis. Jika informasi asimetris terlalu besar, hak suara menjadi simbolik.

Teknologi dapat memperluas partisipasi melalui voting dan dashboard, tetapi keamanan serta identitas anggota perlu dijaga.

Koperasi yang kuat menunjukkan bahwa ownership dapat disebarkan sambil tetap beroperasi secara kompetitif.

T. Ekonomi Rakyat sebagai Basis Ketahanan Nasional

Ekonomi rakyat yang tersebar memberi diversifikasi terhadap shock. Ketika satu sektor atau perusahaan besar terganggu, aktivitas lokal dapat mempertahankan sebagian pendapatan.

Namun usaha kecil juga lebih rapuh secara individual. Ketahanan sistem membutuhkan jaringan, koperasi, finance, insurance, dan digital connectivity.

Local production pada pangan, repair, logistics, dan services dapat memperkuat resilience tanpa mendorong autarki.

Ketahanan nasional terbaik berasal dari kombinasi korporasi besar yang efisien dan jaringan ekonomi rakyat yang fleksibel.

Final Remarks

UMKM, koperasi, dan ekonomi rakyat tidak seharusnya ditempatkan sebagai pelengkap setelah strategi pertumbuhan utama selesai. Mereka adalah bagian dari arsitektur produksi nasional karena menghubungkan jutaan rumah tangga dengan pasar, modal, teknologi, dan kepemilikan.

Agenda paling penting adalah mengubah paradigma dari mempertahankan usaha kecil menuju memperbesar kemampuan. Sebagian usaha akan tetap kecil tetapi produktif; sebagian akan tumbuh menjadi perusahaan menengah; sebagian akan memperoleh skala melalui koperasi.

Koperasi modern perlu dinilai dari member value. Apakah anggota memperoleh harga lebih baik, biaya lebih rendah, market lebih stabil, finance lebih murah, atau aset bersama yang sebelumnya tidak mungkin dimiliki.

UMKM modern perlu dinilai dari productivity dan resilience. Omzet tinggi tanpa margin, cash reserve, atau asset belum tentu menunjukkan kemajuan.

Pemerintah modern perlu dinilai dari kemampuan menciptakan ekosistem. Program terbaik sering bukan yang memberi sesuatu, tetapi yang mengurangi friksi: izin sederhana, data, logistics, standard, procurement, dan competition yang fair.

Perusahaan besar perlu melihat supplier lokal sebagai sumber resilience dan innovation. Hubungan jangka panjang yang disiplin dapat menghasilkan spillover teknologi.

Perguruan tinggi perlu melihat ekonomi rakyat sebagai laboratorium manajemen yang besar. Problem cash flow, quality, governance, digitalization, dan human resources di UMKM adalah problem akademik sekaligus sosial.

Transformasi digital memberi kesempatan mempercepat seluruh proses, tetapi hanya jika teknologi dipakai untuk mengubah keputusan dan proses. Digital presence bukan sama dengan digital productivity.

AI memperluas kemampuan, tetapi UMKM tetap membutuhkan judgement. Tools menjadi semakin murah; kemampuan memilih masalah dan memeriksa hasil menjadi semakin penting.

Ekonomi hijau membuka fase baru karena resource efficiency dapat mengurangi biaya. Repair, reuse, recycling, local food, renewable service, dan eco-tourism adalah pasar ekonomi rakyat masa depan.

Kelas menengah Indonesia akan lebih kuat bila lebih banyak rumah tangga memiliki usaha produktif, saham koperasi, pensiun, equipment, rumah, dan tabungan. Asset ownership adalah hasil penting dari ekonomi rakyat.

Pada tingkat wilayah, jaringan UMKM dan koperasi membuat nilai tambah lebih lama tinggal di daerah. Supplier, processing, retail, tourism, dan service menciptakan multiplier lokal.

Pada tingkat nasional, perusahaan menengah yang tumbuh dari UMKM mengisi missing middle dan memperdalam rantai pasok. Ini mengurangi ketergantungan impor serta memperluas basis ekspor.

Pada tingkat sosial, koperasi dapat membangun trust dan collective capacity, tetapi hanya bila governance bekerja. Koperasi yang buruk justru menghancurkan kepercayaan, sehingga professionalization sangat penting.

Agenda 2045 adalah membangun ekonomi rakyat yang tidak hanya besar dalam jumlah tetapi tinggi dalam kemampuan. Produktivitas, formalitas, digital maturity, asset, dan market access harus meningkat bersama.

Keberhasilan akan terlihat ketika program bantuan dasar semakin sedikit dibutuhkan oleh usaha yang sama karena mereka telah graduate ke sistem pasar dan pembiayaan yang lebih normal.

Keberhasilan juga terlihat ketika koperasi mampu membiayai investment dari retained surplus dan modal anggota, bukan selalu menunggu hibah.

Keberhasilan terlihat ketika UMKM dapat menolak kontrak yang buruk karena memiliki buyer alternatif dan data sendiri.

Keberhasilan terlihat ketika pemilik usaha dapat membayar pekerja lebih baik, menysihkan tabungan, dan mengirim anak ke pendidikan yang lebih tinggi.

Keberhasilan terlihat ketika ekonomi desa bukan lagi identik dengan produktivitas rendah, tetapi memiliki agroindustry, digital service, tourism, energy, dan repair economy.

Keberhasilan terlihat ketika pengusaha perempuan tidak dibatasi oleh care constraint dan ketika pemuda memiliki jalur entrepreneur berbasis skill serta market.

Keberhasilan terlihat ketika krisis tidak selalu menghapus seluruh kemajuan karena usaha memiliki reserve, insurance, dan network.

Ekonomi rakyat yang demikian akan memperkuat pertumbuhan sekaligus pemerataan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer. Masyarakat memperoleh pendapatan karena berproduksi, berusaha, dan memiliki.

Pada akhirnya, fondasi ekonomi yang paling kuat adalah fondasi yang tersebar. Semakin banyak rumah tangga memiliki kemampuan produktif dan aset, semakin luas basis permintaan, pajak, inovasi, serta resilience.

Indonesia memiliki tradisi koperasi, gotong royong, perdagangan lokal, usaha keluarga, dan kewirausahaan yang panjang. Tantangannya bukan menciptakan ekonomi rakyat dari nol, tetapi menaikkan kualitas institusi dan produktivitas yang sudah ada.

Dengan segmentasi kebijakan, koperasi profesional, pembiayaan sehat, digitalisasi produktif, supplier development, dan pendidikan manajemen, ekonomi rakyat dapat bergerak dari survival menuju growth.

Perubahan itu akan menjadikan UMKM dan koperasi bukan hanya simbol pemerataan, tetapi mesin penciptaan nilai nasional.

Ketika ekonomi rakyat naik kelas, perekonomian Indonesia ikut naik kelas karena produktivitas, kepemilikan, dan kesempatan bertumbuh dari bawah serta menyebar ke seluruh wilayah.

Itulah fondasi peningkatan ekonomi Indonesia yang paling inklusif: rakyat bukan hanya menjadi konsumen pembangunan, tetapi produsen, pemilik, inovator, dan pengambil keputusan ekonomi.

Penegasan Akademik tentang Arah Kebijakan Ekonomi Rakyat

Strategi ekonomi rakyat yang matang harus berangkat dari prinsip bahwa kebijakan publik tidak seharusnya menilai keberhasilan hanya dari banyaknya unit usaha yang tetap hidup. Dalam ekonomi yang dinamis, entry dan exit merupakan bagian normal. Usaha yang tidak lagi layak perlu dapat ditutup secara tertib tanpa menghancurkan kehidupan rumah tangga, sementara sumber daya berpindah menuju aktivitas yang lebih produktif. Karena itu, kebijakan perlu membedakan perlindungan sosial bagi individu dari perlindungan tanpa batas bagi unit usaha. Negara sebaiknya menjamin kesempatan kedua bagi entrepreneur dan pekerja, bukan mempertahankan setiap bisnis tanpa memandang kinerja.

Prinsip ini juga berlaku pada koperasi. Koperasi yang tidak aktif, tidak memberikan manfaat kepada anggota, atau tidak memiliki tata kelola yang memadai perlu direstrukturisasi, digabung, atau ditutup secara transparan. Mempertahankan entitas hanya demi statistik jumlah koperasi justru mengaburkan kesehatan sektor. Sebaliknya, koperasi yang berhasil memecahkan persoalan skala harus diberi ruang tumbuh, mengakses modal, membangun manajemen profesional, dan melakukan federasi. Kualitas lebih penting daripada kuantitas administratif.

Penguatan ekonomi rakyat perlu mempunyai dimensi antargenerasi. Banyak usaha keluarga menghadapi persoalan succession karena anak tidak tertarik melanjutkan usaha yang dianggap tidak modern atau terlalu bergantung pada pemilik. Digitalisasi, standardisasi proses, pembukuan, serta pemisahan kepemilikan dan manajemen dapat membuat perusahaan keluarga lebih mudah diwariskan atau dijual. Succession planning juga mencegah hilangnya pekerjaan, pelanggan, dan pengetahuan ketika pemilik memasuki usia lanjut.

Pada koperasi, regenerasi antargenerasi sama penting. Anggota muda memerlukan alasan ekonomi untuk bergabung, bukan sekadar narasi sejarah. Mereka akan tertarik jika koperasi menyediakan akses pasar, teknologi, finance, data, dan peluang leadership yang nyata. Dengan demikian, revitalisasi koperasi membutuhkan value proposition yang relevan dengan ekonomi modern, termasuk layanan digital dan jaringan bisnis lintas wilayah.

Ekonomi rakyat juga harus ditempatkan dalam konteks perubahan pola konsumsi. Konsumen semakin memperhatikan kualitas, kecepatan, keamanan, convenience, sustainability, dan pengalaman. UMKM tidak dapat bertahan hanya mengandalkan harga murah atau kedekatan sosial. Mereka perlu memahami segmentasi pelanggan dan memilih positioning. Sebagian dapat bersaing pada convenience lokal, sebagian pada specialty, sebagian pada authenticity, dan sebagian pada B2B reliability. Strategi yang jelas membantu usaha menghindari perang harga.

Kemampuan membangun merek merupakan bentuk aset tidak berwujud yang sangat penting. Brand memberi peluang mempertahankan margin, membedakan produk, dan mengurangi ketergantungan pada platform. Namun brand tidak dapat dibangun hanya melalui logo. Ia membutuhkan pengalaman pelanggan yang konsisten, kualitas, layanan, cerita yang kredibel, serta komunikasi digital. Perguruan tinggi dan industri kreatif dapat membantu UMKM membangun kemampuan ini secara lebih sistematis.

Peningkatan ekonomi rakyat juga harus memperhatikan kualitas pekerjaan di dalam UMKM. Tidak cukup sebuah usaha naik omzet jika pekerjanya tetap berada pada upah sangat rendah, jam kerja tidak teratur, dan tanpa perlindungan. Kenaikan produktivitas sebaiknya membuka ruang bagi wage progression, training, keselamatan, dan formalitas. Dengan demikian, upgrading UMKM juga menjadi jalur peningkatan kualitas pasar kerja.

Peran teknologi harus selalu dipertimbangkan dari total cost dan manfaat. Mesin baru yang tidak mencapai utilization cukup, software yang tidak dipakai, atau AI yang menghasilkan lebih banyak kesalahan daripada

saving merupakan investasi buruk. Program teknologi perlu memiliki diagnosis, training, maintenance, dan evaluasi. Prinsip smallest sufficient technology sangat relevan: gunakan teknologi yang paling sederhana yang mampu menyelesaikan masalah dengan baik.

Pada tingkat makro, jutaan peningkatan kecil dalam manajemen, kualitas, energy efficiency, digital record, dan market access dapat menghasilkan dampak produktivitas yang besar. Transformasi ekonomi tidak selalu datang dari beberapa proyek raksasa; ia juga dapat tumbuh dari akumulasi learning pada jaringan perusahaan kecil. Karena itu, business extension dan technology diffusion layak memperoleh perhatian setara dengan program pembiayaan.

Ekonomi rakyat juga membutuhkan pasar yang kompetitif. Bila input atau platform dikuasai sedikit pemain, margin usaha kecil tertekan. Competition policy, transparency fee, interoperability, dan procurement yang fair menjadi bagian pemberdayaan. Perlindungan UMKM tidak boleh dilakukan dengan menutup competition, karena competition sendiri merupakan sumber learning. Yang dibutuhkan adalah arena yang tidak dimiringkan oleh privilege atau informasi yang sangat asimetris.

Program pemerintah perlu menjaga konsistensi tujuan sekaligus fleksibilitas instrumen. Target jangka panjangnya adalah produktivitas, formalitas, aset, pasar, dan resilience. Instrumen dapat berubah sesuai teknologi, kondisi kredit, atau struktur sektor. Pendekatan ini mencegah program menjadi ritual tahunan yang tidak lagi relevan tetapi sulit dihentikan.

Akuntabilitas publik juga penting. Masyarakat perlu dapat mengetahui berapa biaya program UMKM, berapa usaha yang benar-benar naik kelas, dan apa dampaknya terhadap pekerjaan serta pendapatan. Transparansi tersebut membantu membedakan program yang efektif dari program yang terutama menghasilkan aktivitas administratif. Pengukuran bukan untuk menghukum pelaksana, tetapi untuk membangun budaya belajar.

Dalam kerangka pembangunan nasional, ekonomi rakyat dapat menjadi penghubung antara pertumbuhan dan pemerataan. Investasi besar menghasilkan demand; UMKM dan koperasi menangkap sebagian demand melalui supplier serta layanan; rumah tangga memperoleh pendapatan; aset lokal meningkat; dan daerah membangun basis ekonomi. Rantai transmisi ini lebih berkelanjutan daripada distribusi manfaat yang hanya bergantung pada transfer setelah pertumbuhan terjadi.

Ekonomi rakyat yang produktif juga memperkuat martabat. Masyarakat memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan, bernegosiasi, mengambil keputusan, dan membangun aset. Mereka tidak diposisikan hanya sebagai penerima program, tetapi sebagai pelaku ekonomi yang memiliki agency. Inilah dimensi penting yang sering hilang ketika pemberdayaan diukur hanya dari jumlah bantuan atau kredit yang disalurkan.

Karena itu, visi jangka panjang perlu sederhana namun ambisius: setiap dekade harus semakin banyak pelaku usaha yang memiliki pencatatan baik, teknologi yang tepat, pasar stabil, pekerja terlindungi, aset bertambah, serta kemampuan menghadapi shock. Semakin banyak koperasi harus mampu membiayai dirinya, mengaudit dirinya, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata kepada anggota. Semakin banyak perusahaan menengah harus tumbuh dari basis lokal.

Jika proses tersebut berlangsung konsisten sampai 2045, struktur ekonomi Indonesia akan lebih dalam. Korporasi besar tetap penting, tetapi mereka berdiri di atas jaringan supplier serta layanan domestik yang kuat. Kota besar tetap menjadi pusat aglomerasi, tetapi kota kecil dan desa memiliki basis produksi sendiri. Digital platform tetap berkembang, tetapi merchant dan koperasi memiliki data serta kemampuan tawar. Pertumbuhan dan pemerataan kemudian tidak berjalan pada jalur terpisah.

Pada akhirnya, agenda UMKM, koperasi, dan ekonomi rakyat merupakan agenda memperbanyak pusat kemampuan ekonomi. Semakin banyak pusat kemampuan berarti semakin banyak sumber inovasi, pekerjaan,

pendapatan, dan ketahanan. Perekonomian nasional menjadi tidak terlalu bergantung pada sedikit perusahaan, komoditas, atau wilayah. Dalam pengertian tersebut, ekonomi rakyat bukan hanya instrumen sosial, melainkan strategi pembangunan produktivitas dan resilience nasional.

Sebagai penutup terakhir, penguatan ekonomi rakyat perlu menjaga keseimbangan antara solidaritas dan disiplin ekonomi. Solidaritas penting karena pelaku kecil sering menghadapi keterbatasan skala, informasi, modal, dan posisi tawar. Disiplin ekonomi sama penting karena organisasi hanya dapat bertahan jika produk dibutuhkan, biaya terkendali, mutu dipercaya, dan tata kelola dapat dipertanggungjawabkan. Koperasi terbaik menggabungkan keduanya: kepemilikan dan partisipasi anggota berjalan bersama manajemen profesional, laporan yang transparan, serta keputusan investasi yang rasional. UMKM terbaik juga tidak kehilangan akar lokal ketika tumbuh; mereka justru mengubah pengetahuan lokal menjadi produk, merek, layanan, dan pekerjaan yang bernilai lebih tinggi. Peran pemerintah adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan proses tersebut berlangsung melalui hukum yang sederhana, infrastruktur, data, pembiayaan yang sehat, pengembangan keterampilan, persaingan yang wajar, dan akses pasar. Peran perguruan tinggi adalah membantu ekonomi rakyat belajar lebih cepat melalui riset, business clinic, teknologi, pengukuran kinerja, dan pendidikan manajerial. Peran perusahaan besar adalah membuka hubungan komersial yang memberikan standar sekaligus peluang belajar. Peran masyarakat sendiri adalah membangun kepercayaan, disiplin organisasi, dan keberanian melakukan perubahan. Bila peran-peran tersebut terhubung, ekonomi rakyat tidak lagi dilihat sebagai sektor yang selalu tertinggal, melainkan sebagai jaringan perusahaan dan organisasi yang terus berkembang. Jaringan ini dapat menjadi sumber kelas menengah baru, pemasok industri nasional, eksportir, penyedia jasa modern, pengelola sumber daya lokal, dan pemilik aset kolektif. Dengan demikian, strategi pembangunan UMKM dan koperasi sesungguhnya adalah strategi memperluas kepemilikan serta kemampuan produktif bangsa. Semakin banyak warga yang memiliki kemampuan menciptakan nilai dan semakin banyak organisasi lokal yang mampu bersaing secara sehat, semakin kuat fondasi peningkatan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan nasional kemudian tidak hanya berasal dari ekspansi beberapa sektor besar, tetapi dari jutaan keputusan produktif yang dilakukan setiap hari di desa, kota kecil, pasar, bengkel, kebun, pelabuhan, rumah produksi, koperasi, dan perusahaan menengah di seluruh Nusantara.

Fondasi tersebut menjadi semakin penting ketika Indonesia menghadapi perubahan teknologi, iklim, demografi, dan perdagangan global. Ekonomi rakyat yang adaptif akan mampu mengubah tekanan menjadi peluang karena keputusan tersebar pada banyak pelaku, sementara koperasi menyediakan kemampuan kolektif ketika skala individual tidak memadai. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan banyaknya program, melainkan makin banyaknya usaha yang produktif, koperasi yang dipercaya, pekerja yang memperoleh kehidupan lebih baik, serta keluarga yang mampu membangun aset. Ketika indikator-indikator itu bergerak bersama, ekonomi rakyat menjadi sumber pertumbuhan, pemerataan, dan kemandirian yang nyata.

Dengan cara itu, peningkatan ekonomi Indonesia bertumpu pada kemampuan rakyat untuk terus belajar, berorganisasi, berinovasi, membangun aset, memperluas pasar, dan memperkuat kesejahteraan secara berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.